

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN PEREMPUAN  
DALAM JABATAN PUBLIK  
(Studi pada Pegawai Kantor Kelurahan Korpri Jaya Sukarama  
Kota Bandar Lampung)**



**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :**

**ANUAR ARIEF**

**NPM : 1321020178**

**Program Studi : Hukum Tata Negara(Siyasah)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERIRADEN INTAN  
LAMPUNG**

**1439 H / 2017 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN PEREMPUAN  
DALAM JABATAN PUBLIK**

**(Studi pada Pegawai Kantor Kelurahan Korpri Jaya Sukarame  
Kota Bandar Lampung)**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :**

**ANUAR ARIEF**

**NPM : 1321020178**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)**

**Pembimbing I : Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M. Hum.**

**Pembimbing II : Frenki, S.E.I., M.Si.**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG**

**1439 H / 2017 M**

## ABSTRAK

Perempuan diberikan kesempatan untuk mengekspresikan diri dan mengambil peluang berperan sesuai dengan keinginannya berkaitan dengan peran perempuan dalam jabatan publik di Indonesia, perempuan menempati jabatan-jabatan dalam sektor publik. Hal ini dimana belum ada kesepakatan mengenai eksistensi perempuan itu ditempatkan. Peran perempuan dalam jabatan publik, bermakna sebagai suatu kegiatan dalam menjalankan perannya sebagai pejabat publik di jabatan struktural.

Rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai peranan perempuan dalam jabatan publik di Kantor Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, pandangan hukum Islam terhadap peran perempuan dalam jabatan publik di Kantor Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran perempuan dalam jabatan publik di Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung menurut pandangan hukum Islam. Untuk menjawab rumusan masalah di atas, peneliti menggunakan suatu metode deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan, mempelajari, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan kemudian menarik kesimpulan dari proses tersebut. Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif dengan metode yang bersifat deskriptif, kualitatif dan induktif.

Berdasarkan hasil penelitiandi Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa peranan kepemimpinan perempuan dalam jabatan publik telah berjalan dengan baik, dikarenakan perempuan itu sudah mencakup pendidikan, pengalaman, mentalitas dan pemahaman perempuan terhadap peran yang diembannya. Pandangan hukum Islam terhadap peranan perempuan dalam jabatan publik *pertama*, tugas dan kewajibannya dalam rumah tangga tidak terbengkalai; *kedua*, harus ada izin atau persetujuan dari suaminya bila ia seorang yang bersuami; dan *ketiga*, tidak mendatangkan hal-hal yang mudharat dan negatif terhadap diri dan agamanya. Nilai dasar hukum Islam lainnya adalah amanah yaitu tanggung jawab dan kewajiban yang diemban dalam menjalani segala sesuatu.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Let.Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telepon. (0721) 703260 Kode pos 35131

**PERSETUJUAN**

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi dengan nama

Nama : Anuar Arief

NPM : 1321020178

Program Studi : Siyasah (Hukum Tata Negara)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN PEREMPUAN  
DALAM JABATAN PUBLIK (Studi Pada Pegawai Kantor  
Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Kota Bandar Lampung)

**DISETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri  
Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Erina Pane, M.Hum  
NIP. 197304142000032002

Frenki, S.E.I., M.S.i  
NIP. 198003152009011017

Ketua Jurusan

Drs. Susiadi AS, M.Sos.I  
NIP. 195808171993031002





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Let.Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telepon. (0721) 703260 Kode pos 35131

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN PEREMPUAN DALAM JABATAN PUBLIK (Studi pada Pegawai Kantor Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Kota Bandar Lampung)**, disusun oleh: **Anuar Arief, Npm: 1321020178**, Program Studi: **Siyasah (Hukum Tata Negara)**. Telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari Kamis Tanggal **30 November 2017**.

**TIM DEWAN PENGUJI**

Ketua Sidang : Drs. Susiadi AS, M.Sos.I

Sekretaris Sidang : Muhammad Irfan, S.H.I, M.H.I

Penguji I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H

Penguji II : Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum

Pembimbing I : Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum

Pembimbing II : Frenki, S.E.I., M.Si



Dr. **Shafindia S. Ag., M.Ag**  
NIP: 197009011997031002

## MOTTO

“Perempuan dan laki-laki itu pada dasarnya sederajat, yang membedakan keduanya adalah jenis kelamin serta ketakwaanya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.”

(Penulis)

“Tidaklah penting dari mana kita berasal, yang penting adalah kemana selanjutnya kita akan melangkah.”



(Brian Tracy)

## PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini sebagai bentuk kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada :

1. Ebakku Armadi Rusban, terima kasih karena telah rela berjalan jauh demi menafkahi keluarga dan telah membimbing penulis dengan ahlak yang mulia sebagai manusia. Dan Emakku tersayang, Yulyani terima kasih karena beliau telah berhasil mendidik penulis dengan penuh kasih sayang yang tiada putus dan selalu mendo'akan anak-anaknya serta mengingatkan penulis kepada Tuhan, tetaplah jadi orang tua kebanggaanku.
2. Adik-adikku Meti Mulia, Tesi Yulia, Faz'an Sari dan Khoirin Panes yang selalu memberikan canda tawa serta dukungan penuh disela-sela aktifitas padat penulis. Semoga Tuhan memberikan hal-hal yang bermanfaat kepada kita Dik, sehingga tidak lupa apa yang pernah kita diskusikan bersama.
3. Susi Fietri Yanti, S.Pd, terima kasih telah menjadi motivatorku serta motivasi-motivasimu yang membentuk pribadiku lebih baik. Perlu kita ketahui bersama bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan bukan untuk saling beradu tapi untuk saling membantu dalam do'a penghulu.
4. Almamater kebanggaanku, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sebagai awal perjalanan penulis dalam membentuk kedewasaan diri.

## **RIWAYAT HIDUP**

Anuar Arief yang dikenal dengan sapaan akrab Wan Ayib, dilahirkan di Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat. Pada Tanggal 07 Oktober 1995, anak pertama dari pasangan suami isteri setia Armadi Rusban dan Ibu Yulyani.

1. Penulis mulai menempuh Pendidikan TK (Taman Kanak-kanak) Pesisir Utara, lulus pada tahun 2001.
2. Penulis melanjutkan Pendidikan dasar di SD Negeri 02 Pesisir Utara, dan lulus pada tahun 2007.
3. Melanjutkan pendidikan menengah pertama di MTs Nahdlatul Ulama Pesisir Barat, lulus pada tahun 2010. Selama pendidikan di MTs NU, penulis aktif di kegiatan ekstrakurikuler Pagar Nusa, dan Pramuka.
4. Melanjutkan Pendidikan menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Krui Pesisir Barat, lulus pada tahun 2013. Penulis juga aktif di ekstrakurikuler Sanggar Seni MAN Krui, Marching Band, Grup Marawis MAN Krui, Rohis, Pramuka Saka Bhayangkara, PMR, Satgas Pesisir Tengah, dan, Serdadu Tawon Pesisir Tengah.
5. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara). Penulis juga aktif diberbagai kegiatan mahasiswa di PMII Rayon Fakultas Syari'ah Komisariat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, DEMA Fakultas Syari'ah dan



Hukum, HMJ Siyasah, UKM Blitz, UKM Maharipal, Pemuda Ansor, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Sekretaris REPDEM PDIP Pesisir Barat, Himpunan Sanak Rantau Pugung Pesisir (HSRPP), Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Pesisir Barat, dan Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) DPC Pesisir Barat.

Bandar Lampung, 28 November 2017

**ANUAR ARIEF**  
NPM. 1321020178



## KATA PENGANTAR

*Assalam 'ualaikum wr, wb*

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Perempuan dalam Jabatan Publik” (Studi pada Pegawai Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Kota Bandar Lampung) dapat diselesaikan, Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini banyak mendapat bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tidak lupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya, dalam kesempatan inilah penulis menyampaikan rasa hormat yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Dr. Alamsyah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.

3. Drs. Susiadi AS, M.Sos.I selaku ketua Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah memfasilitasi kepentingan-kepentingan mahasiswa.
4. Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H selaku Penguji I dalam sidang skripsi terima kasih atas kritik dan saran yang membangun demi terselesainya skripsi ini.
5. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I dan Penguji II yang telah banyak memberikan saran, arahan dan support serta meluangkan waktunya demi terselesainya skripsi ini.
6. Frenki, S.E.I., M.Si selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu banyak dalam membimbing penulis dan memberikan saran serta motivasi-motivasi terbaiknya.
7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
8. Seluruh Guru-Guruku sejak penulis mulai mengenal huruf sampai sekarang, yang telah memberikan pengetahuan serta mendidik dengan penuh cinta kasih.
9. Sidarman, S.IP selaku Lurah Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.
10. Yusfiati, S.IP selaku Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.
11. Kawan-kawanku, Dira Ia Sabda, S.H, Angga Herlambang, S.Ik, , Ardiansyah, S.E, Bro Syarif, S.Pd, Bro Rebi Suhenda, S.Pd.I, Yai Arif, S.H, Riky Farenza, Kang Chuko, S.H, Cik Abdul Mumeen, Rohaji, Pande Jasa Duhita, S.E.I,

Mujibur, Sarhan, Septian Dwi, Muhammad PriaTama, Gus Fachri, Fahmi, Eko Susanto, Cindri Yanto, Doni Apriadi, Kyai Harrist, Susi Ariyanti, S.H, Annisa Ulfa, S.H, Abang Dicky, Kang Ipung, Lukman, Adek Dedi, dan Adek Ridho Febri tetap semangat ya Lur. Juliansyah, Ibramsyah, Panji Kesumo, serta dua pentolan seniorku Kakanda Chori Maulizi, S.Pd.I dan Bustanul Arif Nz, S.Pd.I.

12. Novi Alvia, Thanks telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk kita saling mengenal semoga kedepan sukses ya.
13. Keluarga Besar Sanak Pugung intinya, tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung lur.
14. Sahabat-sahabat Jurusan Hukum Tata Negara khususnya angkatan 2013 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan atau lebih tepatnya jauh dari kata sempurna, oleh karena keterbatasan, kurang mampuan, pengetahuan, dan waktu yang dimiliki. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi literasi ilmu pengetahuan dan semua pihak yang telah membantu, memotivasi, dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini. *Akhirulkalām Wallahul Muwafiq Ila Aqṡamith Thoriq Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Bandar Lampung, 28 November 2017

**ANUAR ARIEF**  
NPM. 1321020178



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP .....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x

### BAB I PENDAHULUAN

A. PenegasanJudul .....	1
B. AlasanMemilihJudul .....	3
C. LatarBelakangMasalah .....	4
D. RumusanMasalah.....	9
E. Tujuan danKegunaanPenelitian .....	9
F. MetodePenelitian .....	10

### BAB II PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN PEREMPUAN DALAM JABATAN PUBLIK

A. KedudukanPerempuandalamJabatanPublik .....	16
B. Hak-hakPerempuandalamJabatanPublik.....	23
C. PeranPerempuandalamJabatanPublik .....	34

### BAB III PERAN PEREMPUAN DALAM JABATAN PUBLIK DI KANTOR KELURAHAN KORPRI JAYA

A. GambaranUmumKelurahanKorpri Jaya .....	47
B. StrukturPemerintahanKelurahanKorpri Jaya .....	52

C. Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Pemerintahan Kelurahan Korpri Jaya .....	55
D. Perempuan sebagai Pejabat di Kelurahan Korpri Jaya.....	61

#### **BAB IV ANALISIS**

A. Peran Perempuan dalam Jabatan Publik di Kantor Kelurahan Korpri Jaya.....	66
B. Peran Perempuan dalam Jabatan Publik di Kantor Kelurahan Korpri Jaya Menurut Hukum Islam .....	69

#### **BAB V KESIMPULAN**

A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	75

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Sebelum mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian judul. Judul merupakan kerangka dalam bertindak dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda di kalangan pembaca. Oleh karena itu perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul penelitian ini.

Judul penelitian yang akan dilakukan ini adalah : **“Analisis Hukum Islam terhadap Peran Perempuan dalam Jabatan Publik (Studi pada Pegawai Kantor Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Kota Bandar Lampung)”**. Adapun beberapa istilah yang perlu diuraikan yaitu sebagai berikut :

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa karangan, perbuatan, dan lain-lain untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya, untuk memperoleh pengertian yang tepat serta pemahaman yang relevan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), Edisi Keempat, h. 58.

Hukum Islam adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia, yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.<sup>2</sup>

Peran adalah merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.<sup>3</sup> Sedangkan perempuan adalah seseorang yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.<sup>4</sup> Dengan demikian pengertian peran perempuan adalah serangkaian perilaku seseorang perempuan melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai.<sup>5</sup> Sedangkan publik adalah orang banyak (umum).<sup>6</sup> Dengan demikian pengertian jabatan publik adalah pegawai pemerintahan yang mempunyai kedudukan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk mengurus kepentingan orang banyak.

Berdasarkan pengertian beberapa istilah di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dari judul skripsi ini adalah suatu upaya penyelidikan secara mendalam berdasarkan hukum Islam tentang peran perempuan dalam jabatan publik di Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Kota Bandar Lampung.

---

<sup>2</sup>Ngainin Naim, *Sejarah pemikiran Hukum Islam*, (Bandung: Teras, 2009), h. 16.

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h.

<sup>4</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Op., Cit*, h. 753.

<sup>5</sup>*Ibid*, h. 392.

<sup>6</sup>*Ibid*, h. 793.



## **B. Alasan Memilih Judul**

Alasan penulis memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **1. Alasan Objektif**

- a. Kelurahan merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah, konsekuensinya adalah pemerintah kelurahan dituntut memiliki sumber daya manusia yang mumpuni. Karena itu, diperlukan upaya meningkatkan kinerja pemerintah kelurahan yang baik dalam mengambil inisiatif, kebijakan, perancangan, dan pelaksanaan, sehingga memperoleh kinerja pegawai yang baik.
- b. Berdasarkan fakta bahwa peran perempuan belum maksimal dan posisi perempuandilembaga pemerintahan terlihat kurang proporsional, keterwakilan perempuan dalam jabatan publik masih jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan laki-laki.

### **2. Alasan Subjektif**

- a. Kekecewaan masyarakat terhadap pelayanan publik oleh birokrasi pemerintahan di Kelurahan Korpri Jaya, misalnya prosedur pelayanan yang bertele-tele, tidak ada kepastian waktu akibatnya menjadi sulit dijangkau secara wajar oleh masyarakat, dan pegawai pemerintahan di Kelurahan Korpri Jaya sulit ditemui di atas jam 12:00 WIB faktanya itu masih termasuk jam kerja.

- b. Pokok bahasan ini memiliki relevansi dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis tekuni di Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Siyasah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

### **C. Latar Belakang Masalah**

Isu persoalan perempuan selalu menarik dan aktual untuk diteliti, khususnya berkaitan dengan peran perempuan dalam jabatan publik, hal ini dibanyak negara perempuan diterima menempati jabatan-jabatan dalam sektor publik. Ada beberapa nama perempuan yang telah mengukir sejarah di masanya, seperti Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Medelaine Albright, mantan Perdana Menteri Inggris, Margareth Tacher, mantan Perdana Menteri Pakistan, Benazir Butho, tokoh oposisi Burma, Aung San Syu Kyi, dan di Indonesia ada Menteri Pemberdayaan Perempuan Yohana Yembise seta ketua PDI Perjuangan sekaligus mantan Presiden kelima Indonesia, Megawati SoekarnoPuteri.<sup>7</sup>

Sedangkan diLampung sendiri terdapat pula beberapa perempuan yang mengisi peranannyadi sektor publik seperti Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim dan Wakil Bupati Pesisir Barat Erlina Aznur. Mereka semua adalah perempuan-perempuan yangmemegang atau mengurus kepentingan orang banyak di lingkungan masing-masing, dan masih banyak lagi perempuan-perempuan yang menempati posisi jabatan pada sektor publik lainnya.

---

<sup>7</sup>Abdul Djalil, Dkk, *Fiqh Rakyat Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LKiS, 2000), Cetakan 1 Juni 2000, h. 72.

Perempuan telah menjadi kenyataan sosial yang tidak terbantahkan, hal ini tentunya tidak terlepas dari kompleksitas permasalahan yang berhubungan dengan persoalan perempuan sendiri, para pemerhati kajian perempuan mengemukakan bahwa posisi-posisi perempuan demikian itu disamping karena faktor ideologi dan budaya yang memihak kepada laki-laki, boleh juga dijustifikasi oleh kaum agamawan.<sup>8</sup> Secara nyata dapat ditemukan pada peran-peran mereka, baik dalam sektor domestik maupun publik.

Perempuan bukanlah sebagai subyek tetapi hanya dijadikan obyek dalam pembangunan yang telah dilakukan, kebijakan yang diputuskan tidak inspiratif dan tidak *representative* terhadap kaum perempuan bahkan tidak disuarakan, tidak bersuara, dan tidak didengarkan suaranya. Agar perempuan dapat diterima dalam semua bidang tentunya perlu pengakuan dan dukungan dari masyarakat, dan lingkungan sosial juga perlu mendukung untuk memposisikan perempuan seimbang dengan kaum laki-laki.<sup>9</sup>

Terlepas dari kontroversi di atas, Indonesia dan juga negara-negara lainnya, upaya peningkatan peran dan kedudukan perempuan terus berlanjut, salah satu upaya nyata perhatian negara terhadap perempuan. Perempuan pada dasarnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam pembangunan di segala bidang, perempuan diakui sebagai mitra sejajar kaum laki-laki, kental akan budaya patriarki menyebabkan tugas dan peran perempuan di

---

<sup>8</sup>Husen Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2007), h. 23.

<sup>9</sup>Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 138.

identifikasikan sebagai pelaku peranan domestik saja, hal ini menyebabkan peran perempuan pada sektor publik tidak maksimal, sehingga peran mereka mengalami ketertinggalan dibandingkan laki-laki.<sup>10</sup> Keterbatasan dalam hubungan sosial dan budaya, idealnya peran perempuan disektor domestik maupun publik dianggap sama, namun tampaknya hal ini belum terwujud walaupun telah mendapat pengakuan secara yuridis, dan hak-hak perempuan dalam kehidupan politik serta pemerintahan sudah dijamin oleh negara.

Memasuki abad ke-20 terjadi perubahan struktur peranan perempuan Indonesia, ide atau pemikiran dari Barat masuk bersamaan dengan diperkenalkannya dan disebar luaskan pendidikan cara Barat dalam kaitannya dengan politik etika yang dijalankan oleh kaum perempuan pemerintahan Hindia-Belanda, walaupun jumlahnya masih terbatas, namun mulai adanya perempuan yang berkesempatan menikmati pendidikan Barat tersebut.<sup>11</sup> Kemudian muncullah orang-orang yang sadar akan diri dan statusnya. Kesadaran merekapun tumbuh bahwa mereka hidup dibawah kaum penjajah dengan praktek-praktek kolonialnya, seperti R.A.Kartini, Ny.Ahmad Dahlan, Dewi Sartika, dan Hj.Rasuna Said semuanya merupakan tokoh perempuan dari kalangan elit modern Indonesia. pendidikan dan pengetahuan yang mereka peroleh menyadari akan keadaan kaumnya, dengan berbagai cara mereka berusaha untuk menyadarkan hal itu, akan kedudukan dan perannya dalam masyarakat. Pada abad ke-21 peranan perempuan

---

<sup>10</sup>Siti Muri'ah, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karir*, (Semarang: Rasail Media Group, 2011), Cet-1, h. ix.

<sup>11</sup>Abdul Djalil, Dkk, *Op., Cit*, h. 73.



semakin baik, yang menarik bahwa peluang bagi perempuan untuk menjabat atau menempati jabatan-jabatan pada sektor publik semakin meningkat.

Persoalan-persoalan perempuan juga tidak terlepas dari peran Agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul yang sangat berperan penting dalam menentukan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan baik berbangsa dan bernegara, disamping sebagai pedoman juga sebagai pengatur aktivitas pemeluk Islam salah satunya mengatur persoalan perempuan. Persoalan ini kerap menjadi perbincangan menarik apabila kepemimpinan dipegang oleh seorang perempuan sehingga menghadirkan sebuah perdebatan-perdebatan diberbagai kalangan masyarakat. Persoalan perempuan merupakan hal yang aktual untuk dikaji dan telah berlangsung hampir seusia dengan lahirnya kebudayaan Islam, perbedaan antara laki-laki dan perempuan ternyata masih menyimpan beberapa masalah, baik dari segi substansi kejadian maupun peran yang diemban dalam masyarakat.<sup>12</sup> Peranan perempuan dalam masyarakat kerap kali masih menjadi pokok persoalan, dimana kecenderungan penilaian bahwa normativitas Islam menghambat ruang gerak perempuan-dalam masyarakat, hal ini didukung oleh pemahaman bahwa tempat terbaik bagi perempuan adalah di dalam rumah, sedangkan untuk di luar rumah tidak diperbolehkan karena banyak terjadi kemudharatan.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Nasruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), Cetakan ke-2, h.1.

أَمْوَالِهِمْ مَنْ أَنْفَقُوا وَبِمَا بَعْضٌ عَلَىٰ بَعْضِهِمْ ۖ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا لِلنِّسَاءِ عَلَىٰ قَوْمَاتِ الرِّجَالِ

Artinya : “Laki-laki itu adalah pemimpin atas perempuan dengan sebab apa yang telah Allah lebihkan. (QS An-Nisaa : 34)”.<sup>13</sup>

Nash diatas seringkali dipahami bahwa kepemimpinan hanya untuk kaum laki-laki dan menegaskan bahwa perempuan harus mengakui kepemimpinan dari laki-laki.<sup>14</sup> Pada dasarnya perempuan mempunyai hak untuk bekerja dalam berbagai bidang secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat 3 dinyatakan bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”<sup>15</sup> lebih operasional ditegaskan bahwa perempuan mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam pembangunan disegala bidang. Pembinaan peranan perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki ditujukan untuk meningkatkan peran aktif dalam kegiatan pembangunan.

Berdasarkan dari latar belakang seiring dengan kemajuan zaman tidak sedikit kaum perempuan yang menjalankan fungsinya tidak hanya sebagai ibu rumah tangga saja, tetapi sudah meluas kesemua bidang mulai dari politik, sosial, budaya, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penyelidikan secara mendalam berdasarkan hukum Islam mengenai

---

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponogoro, 2006), h. 547.

<sup>14</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), Cetakan ke-13, h. 313.

<sup>15</sup>*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003*, (Jakarta: SekJen dan Kepanitraan MK, 2011), Cet-1, h. 29.

peranan perempuan dalam jabatan publik di Kantor Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Kota Bandar Lampung.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dapat ditarik permasalahan untuk diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peranan perempuan dalam jabatan publik di Kantor Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap peran perempuan dalam jabatan publik di Kantor Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Kota Bandar Lampung ?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini
  - a. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan perempuan dalam jabatan publik di Kantor Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Kota Bandar Lampung.
  - b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap peran perempuan dalam jabatan publik.
2. Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah
  - a. Secara teoritis sebagai sumbangsih pemikiran terhadap pengetahuan, khususnya mengenai perempuan yang bekerja di sektor publik.

- b. Secara praktishasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis, dan untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam NegeriRaden Intan Lampung.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengelola dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.<sup>16</sup> Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.<sup>17</sup>Proses penelitian ini mengangkat data dan permasalahan yang ada secara langsung, tentang berbagai hal yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, dalam penelitian ini yang dilakukan pada pegawai Kantor Kelurahan Korpri Jaya Sukarame KotaBandar Lampung.

---

<sup>16</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994), h. 2.

<sup>17</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Alumni,1986), h. 33.

## b. Sifat Penelitian

Bila dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian (*deskriptif*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara cermat mungkin mengenai suatu yang menjadi obyek, gejala atau kelompok tertentu.<sup>18</sup> Penelitian yang penulis lakukan ingin menggambarkan apa adanya mengenai peran perempuan dalam jabatan publik dan pengaruhnya terhadap bawahan secara struktur di Kelurahan Korpri Jaya Sukrame Kota Bandar Lampung.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung dari objek penelitian yaitu peneliti terjun langsung kelapangan guna melakukan observasi dan wawancara untuk mendapatkan data secara langsung dari obyek penelitian.<sup>19</sup> Penelitian ini berlokasi di Kantor Kelurahan Korpri Jaya Sukrame Kota Bandar Lampung. Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara realistis peran perempuan dalam jabatan publik dalam tugas dan fungsinya.

### b. Data Sekunder

---

<sup>18</sup>Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985), h. 29.

<sup>19</sup>Kartini Kartno. *Op., Cit.* h. 28.

Data sekunder adalah sumber data atau informasi yang diambil dengan bantuan bermacam-macam materiil yang terdapat dalam kepustakaan,<sup>20</sup> dengan data ini maka dapat dikumpulkan data dengan membaca literatur-literatur, buku-buku referensi, struktur organisasi, dan lain-lain, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

### 3. Pengumpulan Data

Upaya pengumpulandata primer, menggunakan metodesebagai berikut:

#### a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan catatan dengan sistematis mengenai gejala-gejala yang diselidiki.<sup>21</sup> Jenis observasi yang dilakukan adalah observasi non partisipan, dimana peneliti hanya mengamati obyek penelitian dan tidak berbaur secara langsung dengan obyek yang akan diteliti.<sup>22</sup>

Observasi ini digunakan sebagai metode utama karena dapat dilakukan ketika proses interview dilaksanakan. Kemudian mencatat kegiatan atau situasi obyek yang akan diteliti, metode ini digunakan untuk mengamati kegiatan-kegiatan, dalam penelitian ini adalah Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakatserta Lurah Korpri Jaya Sukarame Bandar Lampung.

---

<sup>20</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 32.

<sup>21</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), h. 206.

<sup>22</sup>*Ibid*, h. 136.

## b. Interview

Interview adalah tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih berhadapan secara fisik yang dapat melihat muka yang lainnya dan mendengarkan telinganya sendiri suaranya.<sup>23</sup> Pendapat lain menyatakan bahwa metode interview adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>24</sup> Sedangkan jenis interview yang digunakan adalah interview bebas terpimpin, interviewer membawa kerangka pertanyaan-pertanyaan untuk disajikan, tetapi bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu disajikan dan irama interview sama sekali diserahkan kepada kebijakan (*interviewer*).<sup>25</sup>

Pengumpulan data yang penyusun peroleh dari responden untuk mengungkapkan faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, maka responden yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakatserta Lurah Korpri Jaya Sukarame Bandar Lampung.

Interview ini digunakan sebagai metode utama dalam penelitian ini, karena dipandang suatu unsur penting untuk mendapatkan informasi yang

---

<sup>23</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), h. 192.

<sup>24</sup>Lexi. J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2005), h. 135

<sup>25</sup>Sutrisno Hadi, *Op. Cit.*, h. 207



diperlukan sehingga data-data yang akurat dapat diperoleh. Metode ini digunakan mencari informasi dan data-data yang berkaitan dengan peranan perempuan dalam jabatan publik.

c. Dokumentasi

dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, literatur-literatur, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.<sup>26</sup> Jadi metode dokumentasi yaitu mengambil data dari literatur terkait dan sumber-sumber lainnya yang dianggap dapat memberikan informasi berupa bahan tertulis yang berisi keterangan-keterangan yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

4. Pengolahan Data

Data yang terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data yaitu merapihkan dan menganalisis data tersebut. Kegiatan ini meliputi pemeriksaan data dengan cara menentukan kelengkapan data yang diperoleh, penandaan dan penyusunan sistematis. Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan data (*editing*), dilakukan untuk menentukan kelengkapan data yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Penandaan data (*coding*), dilakukan dengan cara mengelompokan data sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas agar memudahkan dalam menganalisis.

---

<sup>26</sup>Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, h. 202.

c. Penyusunan data dalam sistematis (*reconstruction*), dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data pada setiap permasalahan secara sistematis.

## 5. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan prosedur penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>27</sup> Penelitian kualitatif dalam pembahasan skripsi ini adalah dengan mengemukakan analisis dalam bentuk uraian kata-kata tertulis, dan tidak berbentuk angka-angka.

Analisis data menggunakan metode induktif yaitu cara berpikir berangkat dari fakta-fakta, peristiwa yang konkrit, kemudian menguraikan gambaran dari fakta yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum.<sup>28</sup> Dari proses analisis tersebut dapat diketahui bahwa peran perempuan dalam jabatan publik di kantor kelurahan korpri jaya telah berjalan sangat baik, oleh karenanya perempuan yang menjabat sebagai kasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah mencakup persyaratan yang berlaku. Ketika hal ini diterapkan di kantor kelurahan-kelurahan lainnya maka syarat dan ketentuan tersebut berlaku juga secara umum.

---

<sup>27</sup>Lexi. J. Meleong. *Op., Cit.* h. 205.

<sup>28</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h. 112.

## BAB II

### PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN PEREMPUAN DALAM JABATAN PUBLIK

#### A. Kedudukan Perempuan dalam Jabatan Publik

Kepemimpinan sering didefinisikan sebagai proses membuat orang lain terinspirasi untuk bekerja keras dalam menyelenggarakan tugas-tugas penting. Hal yang menjadi unsur dalam lapisan masyarakat adalah kedudukan dan peranan, kedudukan dan peranan mempunyai arti yang penting bagi sistem sosial yang mengatur hubungan timbal balik antar individu dengan masyarakat dan tingkah laku.<sup>1</sup> Pengertian kedudukan menurut Soerjono Soekanto adalah tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang-orang lain dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya.

Ketika risalah Islam hadir pada 15 abad yang silam, ajarannya secara substansial telah menghapuskan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan.<sup>2</sup> Islam memandang perempuan pada dasarnya memiliki kedudukan yang setara dengan pihak laki-laki, walaupun ada perbedaan maka itu adalah akibat fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan kepada masing-masing jenis kelamin sehingga perbedaan yang ada tidak menyebabkan satu lebih memiliki kelebihan atas yang lain, melainkan mereka saling melengkapi dan bantu-membantu.

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 210.

<sup>2</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 200) h. 83.

Berkaitan dengan perempuan Al-Qur'an memberikan perhatian khusus kepada kaum perempuan yang pada saat diturunkan, kedudukannya sangat rendah di hadapan kaum laki-laki, Islam mengangkat derajat kaum perempuan setara dengan kaum laki-laki.<sup>3</sup> Satu kedudukan yang tidak pernah dimiliki oleh perempuan-perempuan lain dalam agama samawi terdahulu dan tidak pula dalam kelompok masyarakat manusia yang diatur oleh sesama mereka dengan meletakkan perundang-undangan dan peraturan-peraturan tersendiri. Namun demikian, masih banyak orang mengira bahwa Islam telah merampas hak perempuan, menurunkan derajatnya dan menjadikannya sebagai barang mainan kaum laki-laki, dimana mereka boleh bertindak sewenang-wenang terhadap perempuan, kapanpun dan dalam bentuk apa saja, padahal Al-Qur'an telah memposisikan laki-laki dan perempuan secara seimbang.<sup>4</sup> Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut :

حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ دَرَجَةٌ عَلَيْهِنَّ وَلِلرِّجَالِ بِالْمَعْرُوفِ عَلَيْهِنَّ الَّذِي مِثْلُ وَهْنٍ

Artinya: *Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf (QS Al-Baqarah:228).*<sup>5</sup>

Al-Qur'an sebagai konsepsi dasar ajaran Islam telah menjelaskan bahwa posisi perempuan sejajar dengan laki-laki. Oleh karena itu pemahaman

---

<sup>3</sup>Ibid., h. 84.

<sup>4</sup>Ibid., h. 86.

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponogoro, 2006), h. 36.

miring terhadap kedudukan perempuan dalam Islam, hal itu sebenarnya hanya hasutan orang-orang non-muslim atau kaum orientalis. Islam tidak hanya sekedar menempatkan perempuan dalam kerja sama dengan laki-laki pada semua aspek tanggung jawab, baik secara khusus maupun secara umum.<sup>6</sup> Lebih dari itu, Islam telah mengangkat derajat perempuan dan menempatkan sebagai perimbangan atas tanggung jawab yang dipikul di pundak mereka. Islam mengharuskan adanya penghargaan kepada kaum perempuan apabila ternyata mereka benar, persis seperti penghargaan yang harus diberikan kepada laki-laki. Jika Islam berkenan menerima pendapat sebagian laki-laki, maka ia pun menerima pendapat sebagian perempuan.<sup>7</sup>

Allah SWT, telah menetapkan dan menjadikan pendapat perempuan sebagai syarat umum yang abadi. Islam memandang perempuan sebagai makhluk yang berakal dan berpikiran, juga mempunyai pendapat yang bernilai dan berharga tinggi. Namun masih banyak orang yang mengatakan kemanusiaan perempuan kurang dari kemanusiaan laki-laki, jadi bukan agama yang memandang rendah kepada kaum perempuan atau memandang remeh terhadap kedudukannya, melainkan pemahaman dan praktik keagamaan yang mengandung bias kultur patriarki.

Agama Islam yang memiliki mayoritas penganut di Indonesia, sangat melarang keras perempuan memimpin publik meskipun kedudukan antara laki-laki

---

<sup>6</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.Cit*, h. 93.

<sup>7</sup>*Ibid.*, h. 94.

dan perempuan sama di mata Tuhan, namun tanggung jawab laki-laki dan perempuan sangatlah berbeda konteks itulah seakan menjadi senjata untuk menghalangi kepemimpinan perempuan sendiri, Islam juga tidak mengenal diskriminasi antara kaum laki-laki dan perempuan, Islam menempatkan perempuan sebagai mitra sejajar kaum laki-laki. Kalaupun ada perbedaan, maka itu adalah akibat fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan agama kepada masing-masing jenis kelamin, sehingga perbedaan yang ada, tidak mengakibatkan satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain.<sup>8</sup> Keduanya saling melengkapi dan membantu dalam memerankan fungsinya dalam hidup dan kehidupan.

Bukti konkrit yang terdapat dalam pembuktian Undang-Undang Dasar 1945 tentang pengakuan hak asasi manusia adalah dalam pernyataan “bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”. Pernyataan tersebut secara terang-terangan mengisyaratkan bahwa hak asasi manusia sangat dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Terlepas dari itu dalam ketentuan pasal 27 ayat 1 UUD 1945 dinyatakan bahwa, setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tidak terkecuali.

Pada era reformasi sekarang ini keterlibatan perempuan dalam pemerintahan, sehingga banyak pandangan yang menghubungkan antara

---

<sup>8</sup>Siti Muri'ah, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karir*, (Semarang: Rasail Media Group, 2011), Cet-1, h. 99.



kemampuan individu dengan aspek biologis yang melekat pada diri seseorang, yaitu berdasarkan perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, perkembangan peranan perempuan sangat pesat sekali, termasuk kedudukan dan peran mereka dalam ruang sosial dan politik sehingga di banyak negara, turut sertanya perempuan dalam kehidupan bernegara dianggap sebagai pertanda suatu kemajuan. Kemajuan dunia pendidikan dan terbukanya lapangan-lapangan kerja baru bagi kaum perempuan, menyebabkan meluasnya daerah kehidupan yang dimasuki kaum perempuan.<sup>9</sup> Bersama dengan itu, meningkat pula interaksi kaum perempuan dengan berbagai jenis lingkungan, baik lingkungan kerja maupun pergaulan sehari-hari.

Di samping itu, kaum perempuan sudah tampil kedepan dan mereka banyak menduduki berbagai profesi karena keahliannya, seperti menjadi guru/dosen, dokter, pengusaha, menteri, hakim, dan lain-lain, jelas hal seperti itu telah dilakukan pula oleh perempuan pada masa jahiliyah, hanya pelaksanaannya berbeda, sesuai dengan kondisi.<sup>10</sup> Karena semakin maju Iptek dan semakin berkembangnya masyarakat. Banyak perempuan-perempuan Islam yang terkenal serta ahli dalam berbagai disiplin ilmu, mereka bukan hanya menjabat sebagai guru, tetapi banyak pula dalam urusan keagamaan, bahkan ada pula yang memimpin negara, sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing.

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, h. 101.

<sup>10</sup>*Ibid.*, h. 102.

Keterlibatan perempuan dalam dunia profesi yang ruang geraknya di sektor publik, sedangkan di sisi lain perempuan sebagai penanggung jawab dalam masalah-masalah internal rumah tangga, oleh sebab itu menimbulkan beberapa pendapat pro dan kontra di kalangan cendekiawan muslim. Abbas Mahmud al-Aqqad misalnya, tidak memperbolehkan perempuan (isteri) bekerja di luar rumah. Alasannya karena pria telah diberi kelebihan kemampuan dalam menghadapi hidup daripada perempuan, oleh karena itu kerajaan perempuan terletak di rumah tangga, meskipun ia memiliki kesanggupan intelektual maupun fisik yang sama dengan kaum laki-laki.<sup>11</sup>

Kegiatan sosial maupun politik, meskipun tidak ada larangan, namun pada masa Rasulullah SAW dan sahabat tidak ada perempuan yang berprofesi sebagai politikus. Keterlibatan mereka di medan perang untuk menjadi perawat dan juru masak sekedar partisipasi dan bukan memegang posisi strategis seperti halnya menduduki jabatan-jabatan tertentu.<sup>12</sup> Ia beranggapan perempuan yang bekerja di luar rumah, lebih banyak mudaratnya dibandingkan manfaat yang diraihnya, yaitu mendatangkan fitnah yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan rumah tangganya.

Pihak lain antara para tokoh muslim juga ada yang berpandangan umum. Rifa'ah Rafi'at-Tahtawi menyatakan bahwa tidak perlu ada diskriminasi atau perbedaan dalam memberikan kesempatan memperoleh pendidikan antara

---

<sup>11</sup> Abbas Mahmud al-Aqqad, *al-Mar'ah fi Al-Qur'an*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1984) h. 124.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 125.

perempuan dan laki-laki agar dalam kehidupan perempuan dapat serasi mengimbangi laki-laki terutama pasangan hidupnya. Dengan pendidikan perempuan diharapkan dapat memperoleh pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuan dan kodratnya, sehingga hidupnya lebih produktif.<sup>13</sup> Sementara itu, al-Hitimi menyatakan bahwa perempuan boleh bekerja, bahkan dibolehkan pula menduduki jabatan di sektor publik, dengan catatan tetap tunduk pada ajaran syari'at yang menghidupi kesuciannya serta tidak menelantarkan peran utamanya sebagai ibu rumah tangga.<sup>14</sup>

Tokoh lain yang membolehkan perempuan bekerja di luar rumah adalah al-Sakhawi yang mengatakan bahwa perempuan-perempuan yang mempunyai keahlian atau kepandaian tertentu, seharusnya diabdikan kepada masyarakat agar manfaatnya menyebar kepada orang banyak.<sup>15</sup> Jamal al-Din Muhammad Mahmud sependapat dengan al-Sakhawi bahwa perempuan berhak mendapatkan kesempatan untuk bekerja (di sektor publik) apabila yang bersangkutan membutuhkan pekerjaan, atau pekerjaan tersebut membutuhkan orang-orang dalam keahlian tertentu, bahkan seharusnya dibuat undang-undang yang sesuai dengan hukum yang berlaku untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan pekerja-pekerja perempuan tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup>Jamal al-Din al-Sayyid, *Rifa'ah Rafi' al-Tahtawi*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1984) h. 64.

<sup>14</sup>Moenawar Khalil, *Nilai wanita*, (Solo: Ramadhani, 1989), Cet.IX, h. 81.

<sup>15</sup>Juwariyah Dahlan, *Peranan Wanita dalam Islam: Studi tentang Wanita Karier dan Pendidikan Anak*, (Yogyakarta: Disertasi IAIN Sunan Kalijaga, 2000), h. 245.

<sup>16</sup>Moenawar Khalil, *Op., Cit*, h. 84.

## B. Hak-hak Perempuan dalam Jabatan Publik

Islam adalah pelopor pertama yang menempatkan posisi perempuan secara layak dan terhormat serta sederajat dengan kedudukan kaum laki-laki. Islam juga menjamin hak-hak individual yang bebas dan merdeka, misalnya membeli, menjual, memiliki, menyewakan, ataupun hibah.

Pandangan agama lain dan hukum positif di luar Islam, kebanyakan tidak memberikan peluang kebebasan pada kaum perempuan terdapat hak-hak pribadinya, seperti peradaban Yunani, Romawi tidak memberikan hak-hak kebebasan pada perempuan untuk bertindak atau hanya sekedar mengeluarkan pendapat, terhadap milik pribadinya sendiri. Islam yang datang untuk memberikan hak-hak asasi terhadap pribadi dalam kehidupan serta haknya untuk bertindak bebas dan bertanggung jawab. Islam memandang sama antara laki-laki dan perempuan sebagai kaidah umum, dikatakan kaedah umum karena terdapat sebagian masalah yang dikecualikan, dalam berbagai hak dan menegakkan tanggung jawab. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 32 berbunyi :

— اللَّهُ إِنْ فُضِّلَ مِنْ اللَّهِ وَسُئِلُوا أَكْتَسَبْنَ مِمَّا نَصِيبُ لِلنِّسَاءِ أَكْتَسَبُوا مِمَّا نَصِيبُ لِلرِّجَالِ  
عَلِيمًا شَيْءٌ بِكُلِّ كَانِ

Artinya: *Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*<sup>17</sup>

Ayat di atas, menjelaskan bahwa Allah SWT melarang orang-orang yang beriman merasa iri hati terhadap orang yang lebih banyak memperoleh karunia dari Allah, karena telah diurnya jalan kehidupan sedemikian rupa. Ayat ini juga menerangkan bahwa laki-laki mempunyai bahagian dari apa yang mereka usahakan, demikian juga sebaliknya perempuan. Sesuai dengan hasil usaha dan kemampuan mereka masing-masing, sesungguhnya keutamaan terletak pada usaha dan kerja keras.

Berdasarkan penafsiran ayat di atas, maka sangat jelas bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam syari'at Islam, keduanya tidak diperkenankan saling iri hati terhadap apa yang mereka dapatkan karena dari keduanya telah Allah SWT gariskan sesuai dari apa yang mereka usahakan dengan usaha dan kemampuan masing-masing individu.

Pandangan Islam terhadap hak bekerja bagi perempuan, hak ini dibenarkan dalam Islam sebagaimana mestinya Islam tidak melarang kaum perempuan bekerja diluar rumah pada saat-saat yang membutuhkan pelayanannya dalam hal positif, baik untuk kepentingan masyarakat maupun kepentingan dirinya sendiri, seperti pendidikan, perawatan pengobatan bagi kaum perempuan dan sebagainya. Dalam

---

<sup>17</sup>Departemen Agama RI, *Op., Cit.* h. 83.

kepentingan ini maka perempuan harus diperlakukan layaknya tugas-tugas laki-laki dalam pekerjaan dan sebagainya, maka hal ini tidak ada larangan kaum perempuan untuk bekerja karena untuk mempertahankan hidupnya, dalam keadaan (waktu) darurat Islam membenarkan perempuan untuk bekerja, seperti umumnya laki-laki. Sehingga dalam problematika urusan rumah tangga dibutuhkan dasar-dasar pengetahuan mengenai kesehatan, pendidikan, kemanusiaan, dan politik, sebagaimana terkait dengan hak-hak perempuan sendiri, uraiannya sebagai berikut:

#### 1. Hak Berkariir

Islam memuliakan kaum perempuan dengan semulia-mulianya dan memerintahkan untuk mengerjakan pekerjaan yang berkaitan dengan kemaslahatan keluarga dan masyarakat. Sehingga ia menjadi unsur pokok pemeran utama dalam membangun keluarga islami, dan daulah Islam. Islam sama sekali tidak melarang kaum perempuan untuk bekerja dengan larangan mutlak, namun Islam memberikan batasan-batasan pekerjaan yang pantas dikerjakan sesuai dengan syari'at yang telah difitrahkan, oleh Allah kepadanya.<sup>18</sup> Salah satu pandangan Islam yang menyinggung perkara yang kontradiktif sebagai berikut :

- a. Pandangan Islam yang mewajibkan pemberian nafkah terhadap ayah suami dan saudara laki-laki. Sehingga perempuan tidak harus mencari pekerjaan untuk menghidupi dirinya, kehormatannya tetap terpelihara dan terhindar

---

<sup>18</sup>Siti Muri'ah.*Op.*, *Cit.* h. 145.



dari kenistaan perbuatan meminta-minta dan lain sebagainya serta jauh dari pembauran dengan laki-laki.

- b. Pandangan dan sikap Undang-undang buatan manusia diberbagai negara yang tidak mengakui kewajiban ayah atau saudara laki-laki memberi nafkah kepada putri ataupun saudara perempuannya. Maka dari itu apabila anak perempuan sudah berusia 17-18 tahun menginjak usia remaja, mereka terpaksa mencari pekerjaan apa saja tanpa mempertimbangkan hal *negative* dan problema yang akan dihadapinya.<sup>19</sup>

Kedua fenomena di atas merupakan realitas sosial masyarakat dimana suatu pihak perempuan harus tetap dirumah dengan menjaga kehormatan diri dan keluarganya serta melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga terhindar dari hal-hal yang nista. Akan tetapi dipihak lain ada perempuan yang terpaksa mencari pekerjaan di luar rumah walaupun umur masih *relative* muda (remaja), dikarenakan adanya pengakuan dimana sang ayah dan saudara laki-laki tidak wajib memberi nafkah. Sehingga perempuan usia remaja terpaksa mencari pekerjaan di luar rumah, untuk memenuhi nafkah hidupnya. Kendatipun demikian keadaannya sebagaimana uraian di atas, bahwa perempuan terpaksa harus bekerja di luar rumah, maka Allah memberikan batasan-batasan pekerjaan perempuan sebagai berikut:

---

<sup>19</sup>HuzaemahTahido Yanggo, M.A. *Op.,Cit.* h. 44.

- a) Hendaknya pekerjaan perempuan disetujui oleh suami, bagi yang menikah dan kedua orang tua bagi yang belum menikah atau siapa saja yang bertanggung jawab atas dirinya.
- b) Hendaknya perempuan bekerja dilapangan yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat, seperti :
- 1) Bekerja dilembaga-lembaga pemerintahan yang mengurus kepentingan orang banyak.
  - 2) Dilembaga kedokteran yang khusus perempuan, sehingga pasien perempuan ditangani oleh dokter perempuan.
  - 3) Tidak bekerja sepanjang waktu, hendaknya meluangkan waktu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban rumah tangga, melayani suami dan anak-anaknya.

Islam menegaskan dalam hal nafkah, sang ayah dibebani untuk bekerja sebagai upaya untuk menghidupi anak dan isteri, Islam juga tidak mengharamkan kaum perempuan untuk bekerja, apabila menghendaknya dengan syarat tidak melanggar norma-norma yang telah ditentukan dalam Islam. Perempuan boleh melakukan pekerjaan yang sejalan dengan tabi'atnya seperti bekerja sebagai dokter, guru dan dosen, dengan tidak memaksakan diri untuk bekerja berbaur dengan laki-laki.<sup>20</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 47.

نَدَّةَ الْغَيْبِ عَلِيمٍ إِلَىٰ وَسْطَرْدُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَرَسُولُهُ عَمَلَكُمْ اللَّهُ فَسَيَرَىٰ أَعْمَلُوا أَوْ قُلِ  
تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ بِمَا فَعَلْتُمْ وَاللَّهُ

Artinya: Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.( QS: At-Taubah 105).<sup>21</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya masyarakat yang sehat dan baik itu adalah masyarakat yang memberikan ketentuan pekerjaan masing-masing terhadap kaum laki-laki maupun kaum perempuan, dimana masyarakat menjamin kaum perempuan untuk dapat membahagiakan suami dan anak-anaknya sepulang dari bekerja sebagaimana halnya suami.

## 2. Hak Kemanusiaan

Membicarakan persoalan perempuan dan kedudukannya sangat menarik, terlebih kendatipun dalam masyarakat yang patrilineal. Hak sosial adalah hak yang berhubungan dengan perilaku dimasyarakat salah satunya hak kemanusiaan yaitu hak untuk mendapatkan penghormatan sebagaimana layaknya manusia. Baik laki-laki maupun perempuan dimuliakan Allah karena mereka berasal dari yang satu.<sup>22</sup> Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Qur'an sebagai berikut :

<sup>21</sup>Departemen Agama RI, *Op., Cit.* h.203.

<sup>22</sup>Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan Relasi gender menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, (Jakarta: Teraju. 2004), h. 146.

مِنْهُمْ وَأَبَشَّرَ نِسَاءَهُمْ بِمَا كُنَّ يَنتَظِرُونَ أُولَئِكَ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ فَهُمْ يَرْجِعُونَ  
 رَقِيبًا عَلَيْكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ وَالْأَرْحَامَ بِهِ تَسَاءَلُونَ الَّذِي اللَّهُ وَاتَّقُوا نِسَاءَكُمْ كَثِيرًا جَالًا



Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. ( QS: An-Nisa' 1).<sup>23</sup>

Allah memberikan isyarat kepada manusia bahwa tidaklah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, terciptanya manusia semua berasal dari satu (adam) darinya kemudian diciptakan pasangan (hawa) dari keduanya berkembang sampai beranak cucu hingga saat ini, dengan demikian antara laki-laki dan perempuan adalah sama baik asal kejadian maupun kehendak. Jika diamati perjalanan sejarah maka dapat di ketahui bahwa kedudukan kaum perempuan lebih terhormat dari yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT, kepada perempuan islam. Untuk itu musuh-musuh islam menggunakan perempuan sebagai sarana yang paling yang paling efektif dalam merusak ajaran agama dengan mengiringi mereka keluar untuk menodai masyarakat dengan menghancurkan moral bangsa.

Kendati demikian keadaanya, maka segala sesuatu mudah mereka lakukan karena itulah wanita islam hendaknya selalu mawas diri dan dituntut

<sup>23</sup>Departemen Agama RI, *Op., Cit.* h. 77.

kesadarannya bahwa hanya agama islam yang mampu memberikan hak-hak kemanusiaan dan keutamaan yang dapat melindungi kehormatan perempuan. islam telah menetapkan tanggung jawabnya bersama dengan laki-laki dan memberikan hak-hak kemanusiaan seutuhnya.

### 3. Hak Pendidikan

Islam mempersamakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal Pendidikan, masing-masing mempunyai hak untuk memperoleh apa saja yang mereka inginkan berupa berbagai macam jenis pengetahuan sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Qur'an sebagai berikut :



إِذَا لَكُمْ اللَّهُ يُفْسَحُ فَأَفْسَحُوا الْمَجْلِسَ فِي تَفْسَحُوا لَكُمْ قِيلَ إِذَا أَمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
بِمَا وَاللَّهُ دَرَجَاتٍ الْعِلْمَ أَوْتُوا وَالَّذِينَ مِنْكُمْ أَمَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ يَرَفَعُ فَاَنْشُرُوا وَأَنْشُرُوا قِيلَ وَ  
خَيْرٌ تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾

Artinya: *Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS.Al-Mujadilah : 11).<sup>24</sup>*

Ayat di atas menjelaskan betapa pentingnya setiap hamba Allah memiliki ilmu pengetahuan (pendidikan), dan allah memberikan drajad bagi hamba-nya. Sebagai penuntun umat Islam menuntut ilmu Allah mengutus seorang Nabi yang pada hakekatnya untuk mengeluarkan umat dari kegelapan,

---

<sup>24</sup>Departemen Agama RI, *Op., Cit.* h. 543.

dengan hidayah Islam, perempuan dan laki-laki bersama-sama mempelajari ilmu sehingga ada kalangan perempuan yang menjadi perawi Hadits Nabawiyah, ada juga yang menjadi dosen perguruan tinggi dan guru disekolah tingkat pertama dan menengah, dan ada pula yang menjadi pahlawan. Dengan ijma' para muslim menetapkan bahwa yang setiap yang difardu'kan dan dianjurkan Allah SWT, kepada para laki-laki sama halnya terhadap perempuan kecuali menyangkut masalah kewanitaannya melahirkan dan mengasuh anak.

#### 4. Hak Politik

Keterlibatan perempuan dalam bidang politik sudah ditunjukkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa, memberikan hak rekrutmen dalam hal pengisian jabatan politik yang memperhatikan kesetaraan gender. Keterlibatan perempuan dalam berpolitik sebagai motor dalam pemerintahan, renungan tentang hak dan kebebasan berpolitik, penting kiranya mengkaji siapakah sebenarnya yang merdeka dalam politik, Agama atau Negara. Negara dan hukum diciptakan untuk menjaga suatu kebebasan, keadilan, dan persaudaraan sehingga ketika Negara dan hukum dipatuhi. (*oke bos, yes ser*), kita akan berbenturan dengan realitas sosial dalam Negara sebagaimana kilas balik sajak-sajak Kahlil Gibran “bagaimana kerbau yang menyukai bebannya dan mencemoohkan kijang yang menamakannya hewan liar” dalam memahami sajak ini ternyata dinegara masih ada yang menyukai hegemoni sebagai pradikmatik sosial dengan merendam kreatif.



Disadari atau tidak inilah kenyataanya, di Negara kita Indonesia masih banyak pejabat dan masyarakat muslim menistakan hak-hak perempuan untuk berpolitik, lain halnya dengan Islam sebagai Agama yang datang untuk menyelamatkan kaum yang berhegemoni oleh kaum *proletary* dan garis keras sebagaimana uraian dibawah ini.

Sejarah Ummu Salamah Ra, salah satu isteri Rasulullah Saw, merupakan tempat berunding Rasulullah Saw, dalam urusan penting dan keberhasilan dalam menyelesaikan perselisihan umat dan sebagai permasalahan kaum muslim. Perlakuan ini bukti dari peningkatan martabat perempuan dalam memberikan adil pada urusan umum dan dalam menyampaikan pendapat.

Ummu Hani juga pernah menjamin keselamatan seseorang tatkala orang tersebut melarikan diri dari kesatuan antara musuh, hal ini menimbulkan perselisihan dengan Ali bin Abi Thalib, yang tetap hendak membunuhnya. Ummu Hani langsung menyampaikan dengan Rasulullah Saw, ternyata Rasulullah mendukung tindakan ummu hani dengan berkata “ telah kami jamin keselamatan orang yang telah engkau jamin wahai Ummu Hani”.

Dari uraian kisah diatas merupakan wujud keadilan islam yang diberikan pada kaum perempuan tentang haknya, dalam menjalankan segala permasalahannya dan keikutsertanya dalam menyelesaikan persoalan ringan sampai persoalan berat dalam urusan negara.

Pada prinsipnya dalam kehidupan bermasyarakat, orang dapat memenuhi kebutuhan ekonominya melalui *sector real*. Pada sektor inilah

perempuan berpartisipasi mendukung perekonomian rakyat tradisi telah memberi tugas kepada perempuan untuk menyelesaikan pekerjaan domestik, pekerjaan rumah tangga dan memelihara kehidupan keluarga. Perempuan yang menjadi istri dan ibu diberi tugas atas dasar gender untuk memelihara anak dan suami serta menjaga kesehatan mereka, sedangkan pekerjaan publik untuk menentukan kehidupan bermasyarakat serta mencari penghasilan keluarga, diserahkan pada laki-laki.<sup>25</sup> Walaupun keadaan zaman modern mendorong perempuan di sektor publik tetapi pandangan peran gender tidak berubah. Akibatnya pandangan yang biasa gender ini menimbulkan berbagai ketidakadilan gender dalam aspek kehidupan ekonomi.

### **C. Peranan Perempuan dalam Jabatan Publik**

Peranan adalah suatu aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan peranannya.<sup>26</sup> Antara kedudukan dan peranan keduanya tidak dapat dipisahkan. Peranan adalah tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki kedudukan atau status. Tidak ada peranan tanpa adanya kedudukan, peranan juga mempunyai arti demikian. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup. Hal itu sekaligus berarti bahwa, peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta

---

<sup>25</sup><http://evilaws.blogspot.com/2013/10/hak-hak-perempuan-di-bidang-politik-dan.html?m=1>.

<sup>26</sup>Soekanto Soejono, *Op., Cit.* h. 243.

kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan.

Peranan merupakan hal yang sangat penting bagi seseorang, karena dengan peranan yang dimilikinya akan dapat mengatur perilaku dirinya dan orang lain. Seseorang dapat memainkan beberapa peranan sekaligus pada saat yang sama, seperti seseorang perempuan dapat mempunyai peranan sebagai isteri, ibu, maupun karyawan kantor tempat dia bekerja.

Peranan mencakup tiga hal, yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>27</sup>

Sementara itu, menurut Moelino definisi peranan sebagai berikut :

- a. Seperangkat tingkat yang diterapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat.
- b. Bagian dari tugas utama yang dilaksanakan.
- c. Proses cara, perbuatan memahami perilaku yang diharapkan dan dikaitkan dengan kedudukan seseorang.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 244.

Peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan tertentu.<sup>29</sup>Defenisi lain mengatakan bahwa, peranan dapat dikatakan sebagai suatu bagian dari satu status yang terdiri dari sekumpulan norma-norma sosial. Norma-norma tersebut terintegrasi dan membentuk suatu peranan.<sup>30</sup>Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status) yang didalamnya melekat unsur hak dan kewajiban, tugas dan wewenang, serta fungsi seseorang atau kelompok dalam masyarakat sebagai suatu organisasi.

Apabila kita kembali ke sejarah jauh sebelum perempuan-perempuan yang sekarang berjuang dalam pembangunan bangsa Indonesia sudah terlebih dahulu putra-putri bangsa yang memiliki kepedulian melalui perjuangannya, seperti kita ketahui bersama, perjuangan Cut Nyak Dien di Banda Aceh yang berusaha mengusir para penjajah bangsa kala itu, yang menunjukkan eksistensi perempuan yang tidak dapat dipandang sebelah mata, namun pada era modern seperti ini, perjuangan perempuan sudah mengarah pada ikut serta dalam pembangunan Indonesia, hak-hak yang dimaksudkan aktif atau demokratis karena merupakan suatu aktifitas manusia yaitu menentukan arah perkembangan masyarakat.

Penjelasan mengenai perempuan, dalam kamus besar Bahasa Indonesia perempuan berarti “wanita dewasa”.<sup>31</sup>Berdasarkan *Old Javanese English Dictionary* kata perempuan berarti yang di inginkan, dengan maksud bahwa

---

<sup>28</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Op., Cit.* h. 667.

<sup>29</sup>Miftah Thoha (2005) h. 10.

<sup>30</sup>*Ibid.*, h. 37.

<sup>31</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Op., Cit.* h. 107.

perempuan adalah sesuatu yang di inginkan laki-laki. Perempuan baru bisa diperhitungkan jika ia bisa dimanfaatkan oleh laki-laki, dengan demikian bahwa perempuan hanya menjadi obyek bagi kaum Adam. Bila di lihat dari karakteristiknya, banyak gagasan tradisional dan *stereotip* yang merendahkan martabat kaum perempuan, kemudian cenderung mempertahankan gagasan bahwa perempuan kurang memiliki kemampuan, bodoh dan acuh tak acuh terhadap lingkungannya. Asumsi ini sekaligus memperjelas bahwa banyak perempuan yang bingung, bodoh, tidak pernah mengeluarkan pendapat, ketakutan, pasif, tidak dapat mengambil keputusan, tidak berpengetahuan, tidak bergairah, hanya tertarik pada *mode* dan kosmetik, lemah, cengeng, kurang mandiri, dan tidak bermotivasi.

Sejumlah Agama besar yang bersifat patriarkiyang diturunkan ke masyarakat, menempatkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan.<sup>32</sup>Fungsi dan beban reproduksinya yang kompleks menyebabkan peran perempuan pada sektor publik tidak maksimal, mereka mengalami ketertinggalan dibandingkan kaum laki-laki, perempuan diidentikan dengan semua kegiatan yang bersifat domestik, sebagai manusia, perempuan mempunyai hak dan kewajiban dalam sektor publik seperti laki-laki juga, termasuk dalam berkarier. Perjuangan kearah pembebasan perempuan dari sikap dan perlakuan diskriminatif,

---

<sup>32</sup>Siti Muri'ah, *Op., Cit*, h. ix

yang menjadikan posisinya termarginalkan telah berlangsung dalam proses panjang.<sup>33</sup>

Berkarier bagi perempuan di satu sisi mempunyai nilai negatif, yakni menimbulkan berbagai masalah, namun pekerjaan dan karier mempunyai nilai positif bagi perempuan dapat dilihat dari berbagai perspektif sebagai berikut :

#### 1) Ekonomi

Berkarier berarti menekuni suatu pekerjaan yang menghasilkan insentif ekonomi dalam bentuk upah atau gaji, dengan hasil tersebut perempuan dapat membantu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.<sup>34</sup> Bagi laki-laki atau suami yang penghasilannya minimal atau bahkan kurang untuk memenuhi kebutuhan ekonomis keluarganya sehari-hari, karier perempuan atau isteri tidak hanya diharapkan namun sangat dibutuhkan.

#### 2) Psikologi

Bekerja bagi manusia tidak hanya dianjurkan tetapi juga menjadi suatu kebutuhan tiap-tiap individu. Walaupun ada kebutuhan lain bagi setiap individu, termasuk perempuan yang dapat dipenuhi dengan bekerja, di antara kebutuhan itu adalah kebutuhan akan pengakuan, penghargaan, dan aktualisasi diri.<sup>35</sup> Saat kesulitan ekonomi menghimpit banyak kalangan dan lapangan kerja semakin sempit memperoleh pekerjaan, dan sukses berkarier merupakan

---

<sup>33</sup>Mansour Fakih, *Analisis Jender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 31-39.

<sup>34</sup>Siti Muri'ah, *Op., Cit.* h. 42.

<sup>35</sup>*Ibid.*, h. 46.

prestasi tersendiri bagi perempuan berkarier. Dengan prestasi tersebut perempuan menjadi lebih percaya diri.

### 3) Sosiologis

Seringkali dijumpai di perusahaan, adanya pegawai atau karyawan yang menolak dipindahkan atau diberhentikan bukan alasan khawatir kehilangan upah dan fasilitas tertentu, tetapi karena tidak ingin berpisah dengan teman kerjanya bahkan ada yang rela bila dibayar rendah, sedang di tempat yang baru gajinya lebih tinggi.<sup>36</sup> Hal ini menunjukkan bahwa motif ekonomi bukan satu-satunya faktor melatarbelakangi perempuan bekerja dan menekuni karier, dengan bekerja perempuan dapat menjalin ikatan dalam pola interelasi kemanusiaan.

### 4) Religius

Pekerjaan dan karier bagi perempuan dapat bernilai religius, sebagai wujud ibadah atau amal shaleh. Jika karena suatu alasan tertentu, suami tidak dapat mencari nafkah secara memadai, sedang kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak terelakkan maka isteri bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, melakukan dengan penuh ketulusan, dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh Agama demikian dapat bernilai ibadah.

Disisi lain menyatakan bahwa secara alamiah bahwa perempuan mempunyai kodrat yang lemah lembut, telaten, penuh kasih, *sensitive*, dan

---

<sup>36</sup>Panji Anorogo & Ninik Widiyanti, *Psikologi dalam Perusahaan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 32.



cenderung dekat secara psikologis dengan anak.<sup>37</sup> Sudah sewajarnya jika perempuan hidup dalam lingkungan rumah tangganya, tugas ini adalah tugas yang dibebankan kepada kaum hawa yaitu, melahirkan dan membesarkan anak dalam konteks rumah tangga. Sementara laki-laki mempunyai tugas lain yaitu, mencari nafkah untuk keluarganya, hal ini sudah menjadi kewajiban seorang kepala keluarga dalam membina hubungan rumah tangga yang harmonis.

Terdapat perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dalam masyarakat, laki-laki berfungsi sebagai produksi yaitu, penghasil dan pemenuhan kebutuhan keluarga, menyebabkan ruang lingkupnya berbeda pada sektor publik dimana tanggung jawabnya sebagai pencari nafkah utama. Sedangkan perempuan berfungsi sebagai reproduksi yang bertugas melanjutkan keturunan atau nasabnya, dimana ruang lingkupnya berada pada sektor domestik, sehingga jika mereka terjun pada sektor publik, mereka akan dihargai sebagai pencari nafkah tambahan, walaupun demikian eksistensi perempuan bekerja pada sektor publik tetapi pekerjaan yang dilakukannya hanya sebagai bentuk tambahan saja.

Menurut Mansur Fakih peran serta perempuan bukan hanya sekedar partisipasi, namun perempuan dituntut untuk mampu bergerak dalam tataan konseptual.<sup>38</sup> Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rangka suatu satuan organisasi

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, h. 37.

<sup>38</sup>Mansour Fakih, *Op.*, *Cit*, h. 52.

yang disebut dengan jabatan, (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 13 Tahun 2002).<sup>39</sup>

Prosedur untuk menentukan tugas-tugas dan hakikat pekerjaan serta jenis orang (berkaitan dengan keterampilan dan pengalaman) yang perlu untuk dilaksanakan. Sedangkan definisi lain, jabatan adalah tahap pertama dalam penyusunan organisasi, dengan adanya pembagian kerja dalam organisasi yang menciptakan banyak pekerjaan.

Perempuan sebagai pejabat publik harus bisa melihat peran mereka dalam pemerintahan, menjalankan roda pemerintahan secara sungguh-sungguh tanpa ada tekanan dari pihak manapun, sehingga dapat menjalankan tugas dengan baik. Tugas dan wewenang perempuan sebagai pejabat publik adalah menjalankan semua aktifitas yang berhubungan dengan publik dan menerima laporan dari masyarakat mengenai tata cara sistem pemerintahan.<sup>40</sup> Perempuan dituntut untuk bisa menjalankan urusan dan mengurus segala hal yang menyangkut masalah publik. Seseorang pejabat publik dilingkungan pemerintahan harus bisa menunjukkan bahwa bisa melaksanakan semua tugas yang diberikan kepadanya dan menjalankannya dengan baik sehingga orang menilai mereka ditunjuk untuk menduduki suatu jabatan sesuai keahliannya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perempuan dalam perannya sebagai pejabat publik antara lain :

---

<sup>39</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.13 Tahun 2002 tentang Perubahan PP 100-2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan.

<sup>40</sup>*Ibid.*, h. 85.

a) Nilai-nilai sosial

Nilai sosial adalah sebagai pengendali perilaku manusia. Nilai sosial merupakan ukuran-ukuran dalam menilai tindakan dalam hubungannya dengan orang lain, dengan nilai sosial orang dapat mempertihungkan apa yang dilakukan oleh orang lain.<sup>41</sup> Nilai yang dianut oleh masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan buruk, yang bertujuan untuk mengadakan tata atau ketertiban. Nilai-nilai yang ada dalam suatu masyarakat bersifat dinamis akan selalu mengalami perubahan, bersamaan meningkatnya pengalaman, atau yang diperoleh dari luar atau perkembangan zaman.

Terjadinya perubahan akan berpengaruh terhadap peran-peran yang dijalankan dalam institusi yang bersangkutan, keluarga merupakan institusi terkecil dari masyarakat yang mengalami hal tersebut. Peran-peran tersebut ditentukan oleh keluarga dan lingkungan budaya kita, banyak peran yang kita warisi tanpa disadari sehingga timbul konflik dalam menjalankan peran tersebut.

Laki-laki dan perempuan dalam Islam akan mendapat pahala yang sama dengan catatan amal shaleh harus disertai iman. Menurut Situmorang, ada beberapa hal yang mendasari mengapa kaum perempuan sudah banyak yang memasuki dunia kerja, yaitu :

- 1) Mereka mencari pekerjaan untuk menyalurkan hobi dan mengembangkan karya serta bakatnya.

---

<sup>41</sup>Siti Muri'ah. *Op., Cit.* h. 224.

- 2) Mereka mencari pekerjaan karena mempunyai kemampuan untuk dapat berprestasi dalam pembangunan dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki.
- 3) Mereka merasa kesepian apabila berada dalam lingkungan rumah tangga saja.

b) Pendidikan

Pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi baik potensi fisik, cipta, rasa, maupun karya. Potensi tersebut menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam kehidupan bermasyarakat, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, fungsi pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia.<sup>42</sup>

Peningkatan peranan perempuan dalam dunia kerja harusnya ditunjang dengan peningkatan tingkat pendidikan perempuan sendiri. Perempuan yang berpendidikan cukup tinggi memiliki pengetahuan dan informasi yang lebih baik serta memahami makna, sehingga lebih cenderung terlibat dalam kegiatan publik dibandingkan dengan perempuan yang berpendidikan rendah. Pekerjaan yang lebih baik yang dimiliki seseorang mencerminkan kemampuan intelektual dan kemampuan pribadinya, dengan demikian pendidikan adalah suatu hal yang pokok bagi kemampuan seseorang dalam kesempatan mempati suatu jabatan-jabatan publik.

---

<sup>42</sup>Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa penyelenggaraan Pendidikan wajib memegang prinsip, yakni Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Menurut Endah Nurdian Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (RAN PKTP) membuat suatu kebijakan dibidang pendidikan yaitu mendukung terciptanya sistem pendidikan yang membentuk rasa saling menghargai dan menghormati, dan mendorong kerjasama antara laki-laki dan perempuan serta menghapus kekerasan melalui kebijakan publik dibidang pendidikan.<sup>43</sup>

Pendidikan juga merupakan landasan dasar untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi pembangunan, perempuan yang kekurangan pendidikan, mungkin tidak akan memperoleh kesempatan-kesempatan dalam mempati suatu jabatan disektor publik. Jikaketidaksetaraan gender dalam pendidikan masih berlangsung maka perempuan beresiko tertinggal dari kaum laki-laki untuk berpartisipasi dalam pembangunan Nasional.

Perbedaan pandangan yang terjadi pada masyarakat maupun terhadap perempuan berpendidikan tidak lepas dari latar belakang budaya yang lebih menunjukan otoritas laki-laki untuk bekerja. Agama juga memberikan proporsi yang sama antara laki-laki dan perempuan serta tidak membedakan dalam mencari ilmu pengetahuan dan merealisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan hal ini seperti apa yang telah Rasulullah SAW praktekkan dalam menuntut ilmu, dan pepatah juga mengatakan bahwa menuntut ilmu sampai ke Negeri China. Ilmu pengetahuan yang didapatkan baik melalui pendidikan

---

<sup>43</sup><https://www.google.co.id/j&url/2011/12/penghapusan-kekerasan-perempuan-html?m=12>. diakses Tanggal 8 Juni 2017, jam 20:00 WIB

formal atau nonformal akan membawa perubahan bagi manusia karena dengan ilmu pengetahuan tersebut manusia dapat meraih apa yang mereka cita-citakan.

c) Komunikasi

Komunikasi sangatlah penting dalam organisasi, komunikasi harus terjalin dengan baik agar terjadinya kerjasama yang efektif antara atasan dan bawahan. Komunikasi adalah arus informasi dan emosi-emosi yang terdapat dalam masyarakat yang berlangsung secara vertikal maupun secara horizontal.<sup>44</sup>

Setiap organisasi yang tuntas, komunikasi akan mendukung suatu tempat utama, karena susunan, keleluasan, dan cakupan organisasi secara keseluruhan ditentukan oleh komunikasi, oleh karena itu dalam sebuah jabatan publik maka komunikasi sangatlah penting mengingat komunikasi tidak hanya datang dari atas melainkan suatu hubungan yang timbal balik dalam organisasi, komunikasi memiliki empat fungsi, yaitu :

- 1) Menyediakan informasi yang sesuai dengan kebutuhan anggota untuk membuat keputusan.
- 2) Sebagai alat untuk memotivasi anggota.
- 3) Sebagai alat untuk mengendalikan perilaku.
- 4) Sebagai media untuk mengungkapkan emosi, antara lain rasa kecewa, senang puas, dan lain-lain.

Penjelasan di atas ialah, komunikasi merupakan faktor yang sangat penting dalam organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung, yang

---

<sup>44</sup>Kartini Kartono, *Psikologi Wanita Jilid 2*, (Bandung: Mandar Maju, 2006), h. 134.

mempengaruhi posisi pegawai dalam jabatan publik termasuk kaum perempuan.

#### d) Pengalaman Kerja

Ada dua sudut pandang yang berbeda menyebabkan perempuan memilih untuk tetap berkerja meskipun sudah menikah. *Pertama* untuk meningkatkan standar ekonomi keluarga dalam arti adanya kebutuhan ekonomi. *Kedua* untuk meningkatkan kualitas hidup seperti keinginan memuaskan diri, ketertarikan dalam melakukan sesuatu atau mengaktualisasikan kemampuan yang ada.<sup>45</sup> Perempuan juga pada dasarnya tidak terlalu berambisi terhadap profesi tetapi tetap melanjutkan bekerja meskipun sudah menikah, hal ini terjadi karena perempuan telah terbiasa bekerja dan tidak terbiasa untuk diam dirumah sebagai ibu rumah tangga saja, pengalaman laki-laki dan perempuan secara individu pada awal bekerja ia mampu mengalahkan rekan kerjanya dalam memperoleh pengetahuan, keahlian dan informasi akan memberikan dampak positif bagi kecerahan prospek karirnya.<sup>46</sup> Kesuksesan dapat diperoleh melalui keinginan berkompetisi dalam pencapaian tujuan, usaha mempertahankan dan meningkatkan karir dengan menunjukkan prestasi kerja yang disiplin. Sejalan dengan bertambahnya pengetahuan serta pengalaman dalam penyelesaian tugas.

Pengalaman kerja dan intelegensi haruslah seimbang, pengalaman kerja tidak dapat digunakan untuk menentukan kemampuan seseorang pegawai

---

<sup>45</sup>Siti Muri'ah. *Op., Cit.* h. 193.

<sup>46</sup>*Ibid.*, h. 193.



dalam menyelesaikan tugas dengan baik, pada permulaan mereka yang mempunyai pengalaman tidak membutuhkan bimbingan dan pengawasan, namun pada masa berikutnya, pegawai diberikan pendidikan secara sistematis untuk menunjukan prestasi yang lebih baik lagi.<sup>47</sup>

Pengalaman kerja dan pengetahuan menunjukan kesuksesan dalam meniti karir, yang dipengaruhi oleh bentuk dan jenis pekerjaan yang spesifik sehingga mendorong seseorang untuk penyelesaian sempurna dan lebih baik dibandingkan orang lain. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan merupakan hal mendasar yang membedakan keinginan untuk berkompetisi. Karakteristik pribadi yang dimiliki perempuan lebih mengarahkan mereka untuk menghindari konflik dan persaingan yang kurang baik.

---

<sup>47</sup>*Ibid.*, h. 194.

### **BAB III**

## **PERAN PEREMPUAN DALAM JABATAN PUBLIK DI KANTOR KELURAHAN KORPRI JAYA**

### **A. Sejarah Berdirinya Kelurahan Korpri Jaya**

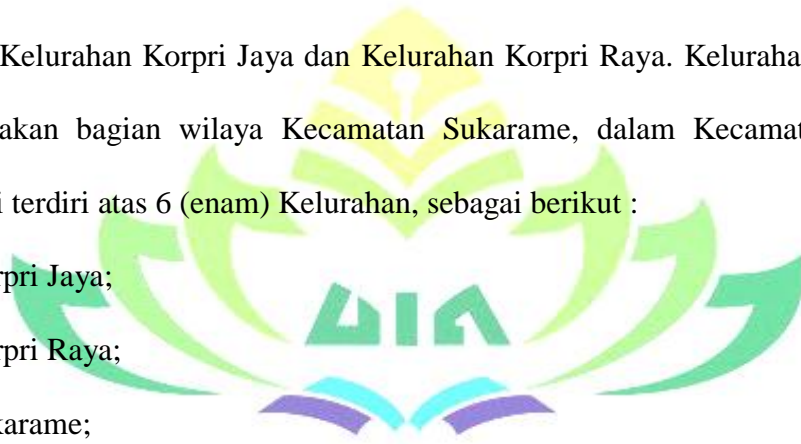
Pada awal berdirinya Kelurahan Korpri Jaya Tanggal 1 Oktober 2002 semula lokasi Kelurahan ini bernama Kelurahan Harapan Jaya berasal dari bagian wilayah Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 yang mengatur tentang Kelurahan. Dalam hal ini Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan pada pasal 1 angka (5) lima menjelaskan bahwa Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah/Kota dalam wilayah kerja kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penghapusan, Pembentukan dan Penggabungan Kelurahan dan Kecamatan dalam Wilayah Kota Bandar Lampung. Menurut pasal 2 ayat (3) tiga Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 yang mengatur tentang Kelurahan, mengatakan bahwa Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satu harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Jumlah Penduduk;
- b. Luas Wilayah;
- c. Bagian Wilayah Kerja;

d. Sarana dan Prasarana Pemerintahan.

Dari keempat syarat tersebut, Kelurahan Korpri Jaya sudah memenuhi syarat-syarat yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 yang mengatur tentang Kelurahan. Pada Tahun 2012 Pemerintahan Kota Bandar Lampung memekarkan 13 Kecamatan menjadi 20 Kecamatan dan dari 98 Kelurahan menjadi 126 Kelurahan, termasuk Kelurahan Korpri Jaya di Kecamatan Sukarame yang mengalami pemekaran wilayah sehingga menjadi 2 Kelurahan yaitu, Kelurahan Korpri Jaya dan Kelurahan Korpri Raya. Kelurahan Korpri Jaya merupakan bagian wilayah Kecamatan Sukarame, dalam Kecamatan Sukarame sendiri terdiri atas 6 (enam) Kelurahan, sebagai berikut :

- 
- a. Korpri Jaya;
  - b. Korpri Raya;
  - c. Sukarame;
  - d. Sukarame Baru;
  - e. Way Dadi;
  - f. Way Dadi Baru.

Tujuan dari Pemekaran wilayah Kelurahan khususnya bidang pemerintahan salah satu bentuk wujud kerja pemerintah Daerah/Kota untuk lebih efektif dalam melayani masyarakat, guna memperpendek rentang kendali pemerintah dalam hal pelayanan publik. Khususnya di wilayah Kelurahan Korpri Jaya yang berlokasi di Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.

Letak geografis Kelurahan Korpri Jaya, menurut Yusfiati selaku Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat bahwa Kelurahan Korpri Jaya yang memiliki luas wilayah 2,49 Km<sup>2</sup> dengan kepadatan penduduk 2.842 per Km<sup>2</sup> jumlah penduduk 7.077 Jiwa dengan rincian 3.508 laki-laki dan 3.569 perempuan kemudian ditetapkan menjadi 2 (dua) Lingkungan yaitu, Lingkungan I terdiri dari 8 Rukun Tetangga (RT) dan Lingkungan II terdiri dari 6 Rukun Tetangga (RT).<sup>1</sup>

Berdasarkan pasal 6 ayat (1) satu Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan dan Penegasan batas wilayah Kecamatan dan Kelurahan, dijelaskan bahwa batas wilayah administrasi Kecamatan dan batas wilayah administrasi Kelurahan dilakukan berdasarkan arah mata angin Barat, Timur, Utara dan Selatan. Selanjutnya di lampiran Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Kelurahan Korpri Jaya memiliki batas wilayah, sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Korpri Raya ;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampus UIN Raden Intan ;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Lapangan Tembak Golf ;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Way Dadi.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 499/2012 Tanggal 1 Juni 2012 secara Administrasi masing-masing nama Kelurahan mulai berjalan sejak Bulan September 2012. Kelurahan Korpri Jaya secara otomatis

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Ibu Yusfiati selaku Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Korpri Jaya Tanggal 21 Juni 2017, jam 11. 20 WIB

memiliki aparaturnya sendiri. Oleh karena itu peran aparaturnya pemerintah ini yang diharapkan oleh masyarakat adanya perubahan kearah yang lebih baik, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada publik semakin baik, pelayanan terhadap masyarakat lebih efektif serta pelaksanaannya cepat, dan pembangunan infrastruktur di daerah Kelurahan Korpri Jaya terlihat merata dan bermanfaat untuk masyarakat setempat. Adapun yang menjadi Lurah di Kelurahan Korpri Jaya, sebagai berikut :

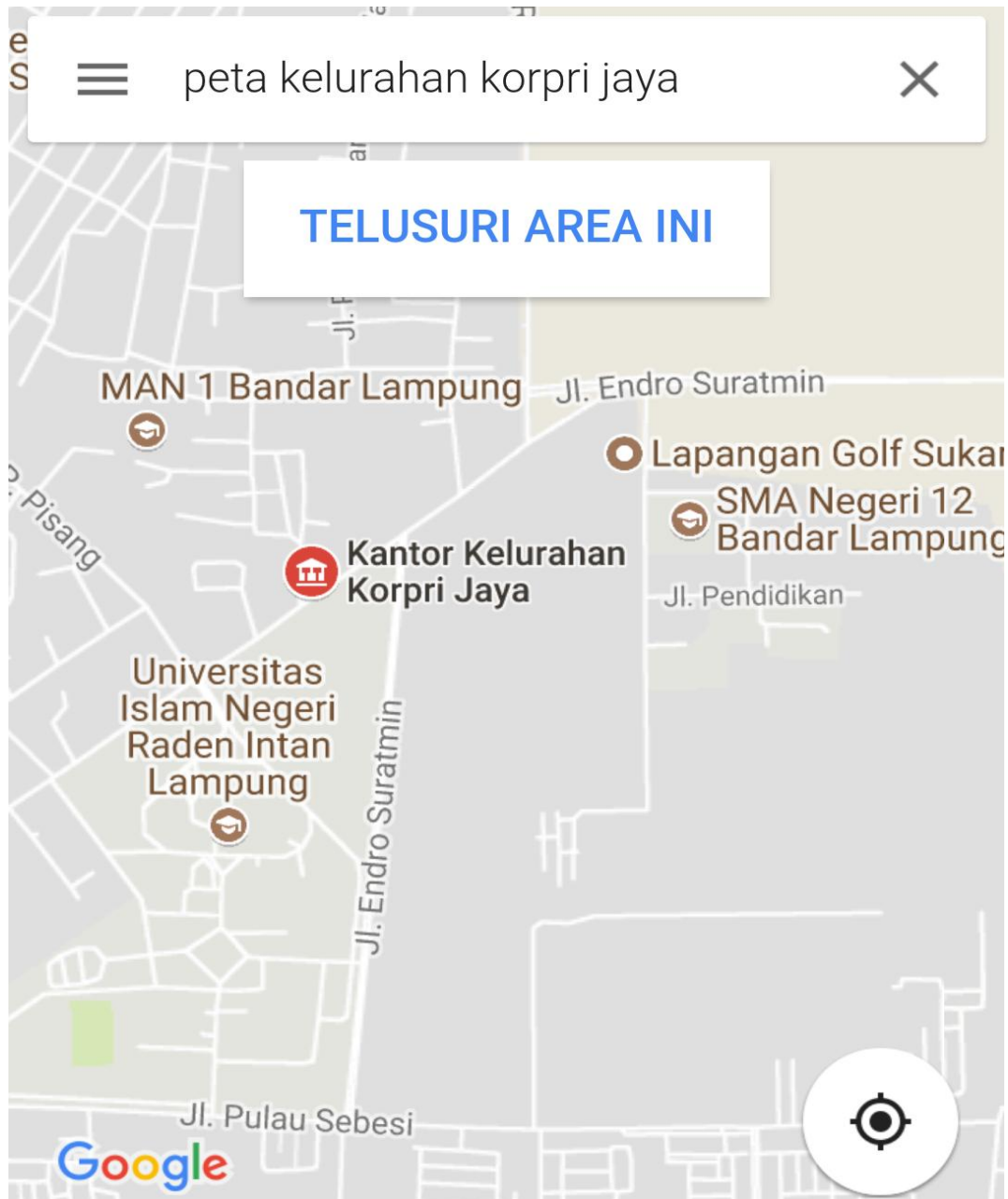
1. Partha Isamoe dari Januari 2002 sampai dengan 03 Mei 2003.
2. M. Helmi, S.H dari Mei 2003 sampai dengan 29 Agustus 2005.
3. Yusuf Musa, S.Sos dari Agustus 2005 sampai dengan 28 Juli 2006.
4. Asnari, S.E dari Juli 2006 sampai dengan 03 Maret 2008.
5. H. Supangat dari Maret 2008 sampai dengan 21 Januari 2009.
6. Danial Kenedi, S.IP., M.H dari Januari 2009 sampai dengan 27 Juli 2009.
7. Adi Surya, BA dari Juli 2009 sampai dengan 28 Februari 2010.
8. Sidarman, S.IP dari Februari 2010 sampai dengan 01 Juni 2012.
9. Sidarman, S.IP dari Juni 2012 sampai dengan sekarang.<sup>2</sup>

Gambar 1

Peta Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame – Kota Bandar Lampung

---

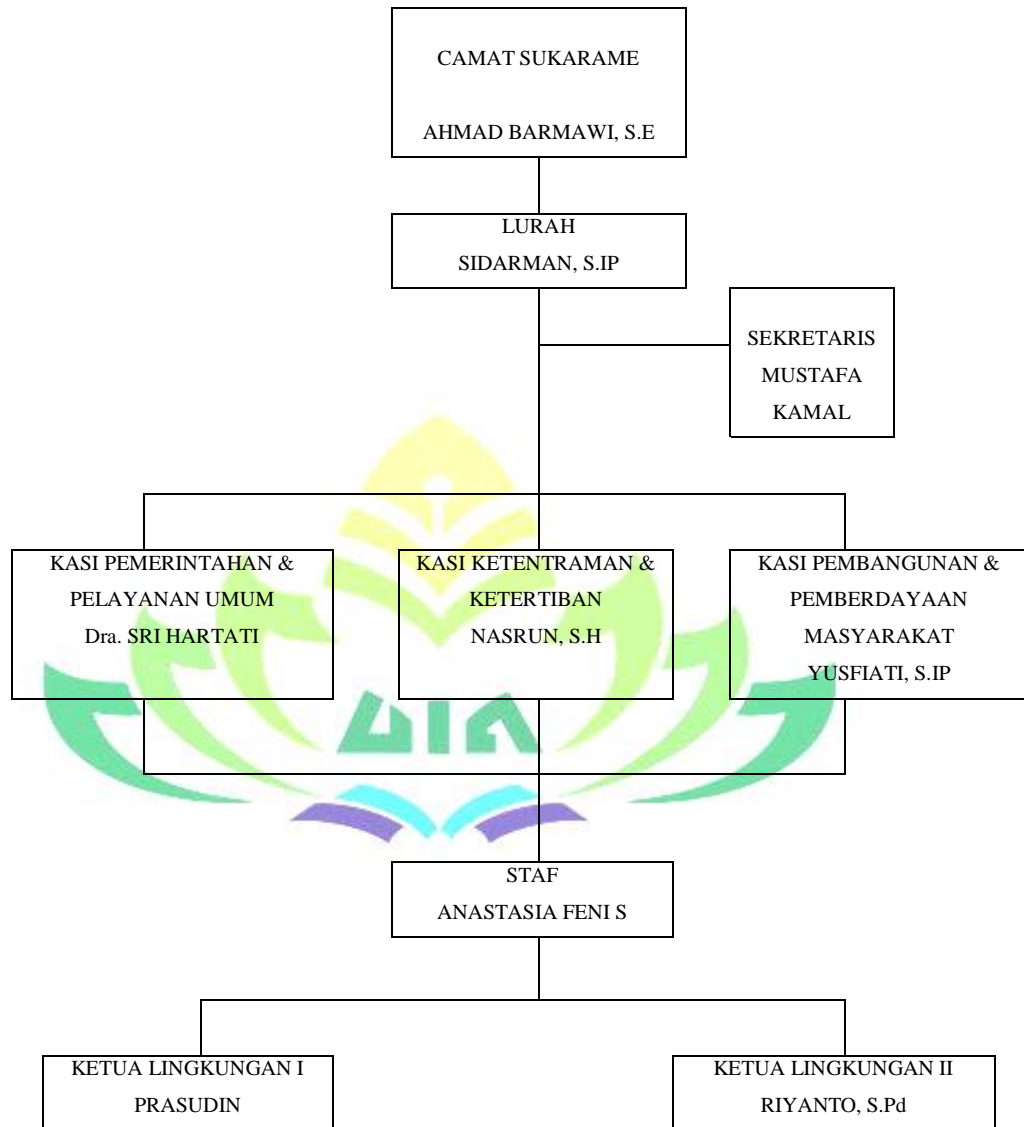
<sup>2</sup>Dokumen Arsip Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Bandar Lampung.



## **B. Struktur Pemerintahan Kelurahan Korpri Jaya**

STRUKTUR PEMERINTAHAN KELURAHAN KORPRI JAYA

KECAMATAN SUKARAME – KOTA BANDAR LAMPUNG



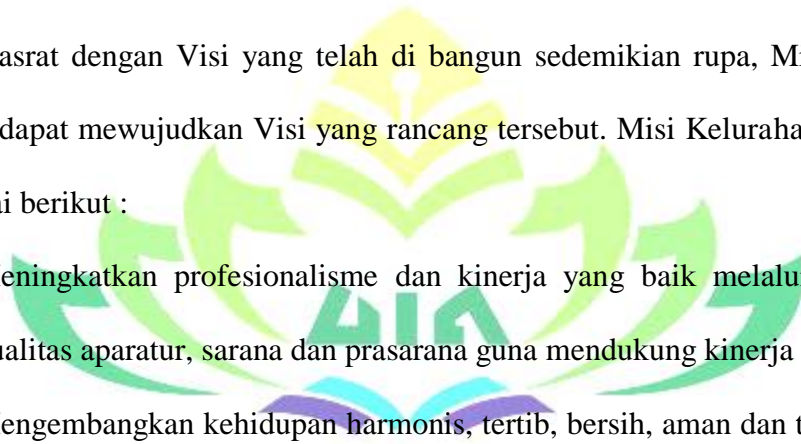
Sumber : Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame – Kota Bandar Lampung

## 1. Visi dan Misi Kelurahan Korpri Jaya



Menurut Sidarman selaku Lurah Korpri Jaya mengatakan bahwa Visi merupakan sebuah inisiatif mendalam untuk masa mendatang mengenai Kelurahan sendiri, tujuan Kelurahan dan yang harus dilaksanakan agar tujuan tersebut tercapai.<sup>3</sup> Visi Kelurahan Korpri Jaya adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan sebagai kawasan pemukiman yang tertib, bersih, aman dan tentram.

Selanjutnya, Misi merupakan langkah agar dapat mencapai suatu keinginan atau hasrat dengan Visi yang telah di bangun sedemikian rupa, Misi di lakukan untuk dapat mewujudkan Visi yang rancang tersebut. Misi Kelurahan Korpri Jaya sebagai berikut :

- 
- a. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja yang baik melalui peningkatan kualitas aparatur, sarana dan prasarana guna mendukung kinerja aparatur.
  - b. Mengembangkan kehidupan harmonis, tertib, bersih, aman dan tentram dalam masyarakat, yang berlandaskan nilai-nilai spiritual dan kebangsaan untuk meningkatkan wawasan terhadap masyarakat.
  - c. Meningkatkan pembangunan di bidang infrastruktur dan fasilitas umum, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Sidarman selaku Lurah di kantor Kelurahan Korpri Jaya Tanggal 21 Juni 2017, jam 11. 20 WIB.

## **2. Tata Kelola Kelurahan Korpri Jaya**

Pada pasal 8 ayat (1) satu Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandar Lampung mengatakan bahwa Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari, antara lain :

- a. Lurah.
- b. Sekretaris.
  - 1. Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum.
  - 2. Kasi Ketentraman dan Ketertiban.
  - 3. Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 5 ayat (1) satu Peraturan Pemerintahan Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal (4) empat. Lurah mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan.
- b. Pemberdayaan masyarakat.
- c. Pelayanan terhadap masyarakat.
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan.
- f. Pembinaan Lembaga pemasyarakatan.

### **C. Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Pemerintahan Kelurahan Korpri Jaya**

Pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatakan bahwa tujuan Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta pemersatuan bangsa.

Selanjutnya, tugas dan fungsi pegawai pemerintahan Kelurahan Korpri Jaya. Berdasarkan pasal 7 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandar Lampung dijelaskan bahwa :

Ayat (1) satu yaitu : Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan umum, ketentraman, dan ketertiban terhadap masyarakat di Kelurahan.

Ayat (2) dua yaitu : Kelurahan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satu, mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan ;
- b. Pemberdayaan masyarakat ;
- c. Pelayanan masyarakat ;
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.

Menurut Yusfiati, selaku Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mengatakan bahwa tugas pokok Sekertaris Lurah adalah membantu

Lurah dalam melaksanakan tugas-tugas yang meliputi ketatausahaan, administrasi, kepegawaian, keuangan, perencanaan, perlengkapan, evaluasi dan laporan kerja.<sup>4</sup>

Sedangkan fungsi Sekretaris Lurah sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Lurah ;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Lurah ;
- c. Pelaksanaan pengurusan administrasi kepegawaian ;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan ;
- e. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan kelurahan ;
- f. Pelaksanaan koordinasi perencanaan, evaluasi dan laporan tugas-tugas seksi dan kelompok jabatan fungsional ;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Lurah ;
- h. Penyelenggaraan rapat-rapat dinas, upacara, penerimaan tamu dan acara-acara kedinasan lainnya di luar kegiatan yang telah tercakup dalam kegiatan-kegiatan lainnya ;
- i. Pelaksanaan pengurusan surat-surat dan kearsipan kelurahan.

Selanjutnya, Yusfiati, S.IP. menjelaskan bahwa Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang diberi tugas membantu Lurah, dalam penyusunan dan pelaksanaan rancangan program kerja Kelurahan urusan pemerintahan umum dan pelayanan umum, dan urusan

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Ibu Yusfiati selaku Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Korpri Jaya. *Op.,Cit.*

lainnyayang dilimpahkan oleh Walikota kepada Lurah.<sup>5</sup> adapun urusan tugas Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum, sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rancangan program kerja kelurahan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum ;
- b. Penghimpunan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, dan bahan-bahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum kelurahan ;
- c. Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan umum kelurahan ;
- d. Penyiapan petunjuk teknis penyelenggaraan tugas, tanggungjawab dan kewenangan kelurahan lingkup tugas pemerintahan dan pelayanan umum ;
- e. Penyusunan bahan laporan serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum di kelurahan ;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai dengan prosedur tugas dan fungsinya.

Secara umum dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Kelurahan mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum;
- b. Menyusun program dan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil ;
- c. Pelaksanaan tugas-tugas di bidang ke agrarian ;
- d. Pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Ibu Yusfiati selaku Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Korpri Jaya. *Ibid*.

Kepala Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan yang bersifat teknis, pembinaan, dan pelaksanaan dibidang pemberdayaan masyarakat, meliputi pelaksanaan program pembinaan kesehatan, keluarga berencana, bantuan dan pelayanan sosial.<sup>6</sup>Sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rancangan kerja kasi pemberdayaan masyarakat berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja kelurahan ;
- b. Memberikan petunjuk atau arahan serta mendistribusikan tugas lainnya kepada bawahan ;
- c. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis program-program kelurahan sesuai dengan bidang dan tugasnya ;
- d. Melakukan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan-kegiatan agar lebih efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Menerapkan standar pelayanan minimal yang sesuai dengan bidang dan tugasnya;
- f. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan secara teknis dibidang pemberdayaan masyarakat ;
- g. Melakukan penyiapan bahan penilaian terhadap pemberdayaan masyarakat kelurahan ;
- h. Melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat ;
- i. Menyiapkan fasilitas pelaksanaan pembinaan terhadap masyarakat khusus untuk penderita cacat, tuna karya, tuna wisma, dan tuna sosial ;

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu Yusfiati selaku Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Korpri Jaya. *Ibid.*

- j. Melakukan inventaris dan pengelolaan data golongan keluarga kurang mampu, rumah tidak layak huni, korban bencana alam, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya ;
- k. Menyiapkan fasilitas pemberian bantuan sosial ;
- l. Menyiapkan fasilitas pembinaan terhadap usaha-usaha masyarakat dibidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana ;
- m. Menyiapkan fasilitas untuk pembinaan dan pemberian bantuan terhadap PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan), karang taruna, dan P2W (Peningkatan Peranan Perempuan).
- n. Memproses rekomendasi nikah, talak, cerai dan rujuk ;
- o. Menyiapkan fasilitas kegiatan PMI (Palang Merah Indonesia) ;
- p. Melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang pemberdayaan masyarakat ;
- q. Menyiapkan fasilitas pelaksanaan sosialisasi dibidang pemberdayaan masyarakat;
- r. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik ;
- s. Memberikan usul serta saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas ;
- t. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas tersebut ;
- u. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Tugas pokok dan fungsi Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Korpri Jaya. Kepala kasi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum.



Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a) Perencanaan penyusunan program kerja dan kegiatan kasi ketentraman dan ketertiban umum ;
- b) Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan yang dibawah kasi ketentraman dan ketertiban umum ;
- c) Pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat dibidang ketentraman dan ketertiban umum.

Tugas pokok dan fungsi Kasi Pembangunan Kelurahan Korpri Jaya. kasi pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam bidang pembangunan, untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan kasi pembangunan ;
- b. Pengkoodinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di bawah nawungan kasi pembangunan ;
- c. Pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat dibidang pembangunan ;
- d. Pelaksanaan kegiatan kasi pembangunan.<sup>7</sup>

#### **D. Perempuan Sebagai Pejabat di Kelurahan Korpri Jaya**

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Yusfiati selaku Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Korpri Jaya. *Ibid.*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pelayan masyarakat atau Abdi Negara yang memiliki tanggung jawab terhadap pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu harapan masyarakat terhadap Aparatur Sipil Negara adalah kinerja yang mumpuni dan handal yang diberikan dalam pelayanan terhadap publik.

Menurut Yusfiati mengatakan bahwa sumber daya manusia yang berkinerja dengan baik akan lebih memudahkan organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuannya.<sup>8</sup> Sumber daya manusia adalah faktor yang sangat penting hal ini merupakan suatu elemen yang perlu diperhatikan oleh organisasi, oleh sebab itu sumber daya manusia dengan kinerja yang baik sangat dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan program kerja organisasi tersebut, tanpa adanya sumber daya manusia dengan kinerja yang baik maka sulit bagi sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya.<sup>9</sup>

Sedangkan Sidarman menjelaskan bahwa peningkatan kinerja pegawai bukanlah suatu hal yang mudah karena banyak faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja seseorang dan hal ini perlu waktu yang cukup untuk meningkatkan kualitas seseorang pegawai.<sup>10</sup> Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap peran-peran penting sebagai pejabat publik.

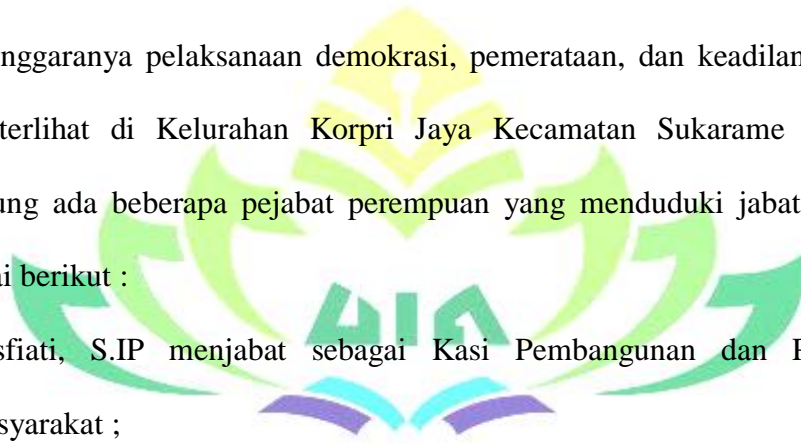
---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Ibu Yusfiati. *Ibid.*

<sup>9</sup>Wawancara dengan Bapak Sidarman. *Op., Cit.*

<sup>10</sup>Wawancara dengan Ibu Yusfiati. *Op., Cit.*

Senada dengan ungkapan Presiden Indonesia ke tujuh, dalam acara puncak Peringatan Hari Ibu (PHI) ke 88. Menurut Jokowi, para perempuan yang berperan sebagai pejabat publik bisa memberikan kontribusi untuk membentengi generasi-generasi muda masa mendatang.<sup>11</sup> Terutama di tengah persaingan global, peran perempuan diharapkan mampu memperkuat 80 persen penduduk Indonesia yang didominasi oleh kaum perempuan tersebut. Dimana peran serta masyarakat baik laki-laki maupun perempuan menjadi salah satu tiang penyangga bagi terselenggaranya pelaksanaan demokrasi, pemerataan, dan keadilan. Begitu juga yang terlihat di Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung ada beberapa pejabat perempuan yang menduduki jabatan tertentu, sebagai berikut :

- 
1. Yusfiati, S.IP menjabat sebagai Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat ;
  2. Dra. Sri Hartati menjabat sebagai Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum ;
  3. Anastasia Feni S, A.Md menjabat sebagai Staf Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat ;
  4. Oktasari Dwi Anggraini menjabat sebagai Babinkamtibmas ;
  5. Dra. Suryani Anwar menjabat sebagai PPN.

Secara keseluruhan jumlah pegawai Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung yang menduduki jabatan struktural sebanyak 28

---

<sup>11</sup> Pidato Jokowi acara puncak Peringatan Hari Ibu (PHI) ke 88 di Serang Banten pada Tanggal 22 Desember 2016.

orang, dan 5 orang diantaranya adalah kaum perempuan, masih di dominasi oleh kaum laki-laki yang bekerja di kantor Kelurahan Korpri Jaya.<sup>12</sup> Sementara untuk pendisiplinan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kelurahan Korpri Jaya sendiri sudah menggunakan cara absensi kornea mata atau lebih dikenal *Easy Clocking EC-IRIS* merupakan mesin absensi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang paling efektif di Dunia saat ini, dalam waktu kurang dari satu detik identitas pegawai secara otomatis akan diverifikasi sendiri, pemindaian retina adalah bentuk akurasi dalam mengidentifikasi individu di daerah lalu lintas tinggi dan sistem sidik jari yang sangat privasi cepat dan mudah digunakan.<sup>13</sup>

Pemberian pelayanan yang baik dapat dilihat dari besarnya sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh birokrasi pemerintahan untuk melayani masyarakat. Idealnya segenap kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh aparat birokrasi betul-betul dikonsentrasikan terhadap pelayanan masyarakat umum, hal ini sangat penting agar orientasi pada pelayanan dapat tercapai. Aparatur yang ideal adalah yang tidak dibebani oleh tugas-tugas lain di luar jam kerja.

Pelayanan yang ideal juga seharusnya tidak memiliki kegiatan atau pekerjaan lain seperti hal nya pekerjaan sambilan di luar pekerjaan kantor, yang dapat mengganggu tugas-tugas penyelenggaraan pelayanan, sehingga pelayanan

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan Ibu Yusfiati. *Op., Cit.*

<sup>13</sup>Wawancara dengan Ibu Yusfiati. *Ibid.*

terhadap masyarakat akan dapat maksimal apabila konsentrasi pegawai benar-benar tercurahkan untuk melayani masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 penilaian kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara atau pegawai dalam menjalankan tugasnya, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh atasan/pimpinan instansi baik secara langsung maupun dengan menggunakan bantuan-bantuan lembaga untuk menilai kinerja pegawainya. Tujuan dan fungsi dari penilaian adalah untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana kinerja pegawai pada suatu lembaga dalam rangka mencapai tujuan dari pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurut Yusfiati mengatakan bahwa hasil kerja dari seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara prestasi kerja yang dicapai sumber daya manusia per satuan periode waktu melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya dalam organisasi. Hasil kerja yang dimaksud dapat berupa hasil kerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.<sup>14</sup>

Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penilaian kinerja PNS terdiri atas unsur sasaran kerja pegawai (SKP) serta perilaku kerja, tujuan dilakukannya penilaian terhadap kinerja pegawai agar objektivitas pembinaan terjamin yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier secara adil dan

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ibu Yusfiati. *Ibid.*

wajar denga tidak membeda-bedakan latar belakang politik, ras, agama, warna kulit, jenis kelamin, umur atau kondisi lainnya.



## **BAB IV ANALISIS**

### **A. Peran Perempuan dalam Jabatan Publik di Kantor Kelurahan Korpri Jaya**

Peranan perempuan Indonesia dalam menegakkan kehidupan bangsa tidak dapat diabaikan begitu saja sejak zaman reformasi perempuan terlihat aktif dalam organisasi-organisasi yang terpaut dengan strategi dalam memperjuangkan hak-hak mereka juga bahu-membahu saling membantu dengan kaum laki-laki untuk mewujudkan cita-cita yang hendak dicapai. Seperti telah diketahui, masa pergerakan Nasional adalah suatu masa di mana bangsa Indonesia dalam perjuangannya untuk melepaskan diri dari penjajahan asing, tidak lagi mengandalkan pada kekuatan senjata, melainkan dengan menggunakan suatu organisasi yang teratur.

Kegiatan kaum perempuan semula kegiatan mereka ditekankan pada perbaikan kedudukan sosial dalam perkawinan dan keluarga serta peningkatan kecakapan sebagai ibu dan pemegang rumah tangga saja, kemudian selanjutnya perhatian mereka pun terarah terhadap kegiatan politik semakin nampak. Pada tahun 1928 kaum perempuan berhasil membentuk Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI) kemudian berubah nama menjadi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia (PPII) pada tahun 1929 melalui Kongres Perempuan Indonesia Pertama 22 Desember 1929 hal ini merupakan suatu kemajuan kaum perempuan Indonesia ketika berbagai kegiatan telah dilakukan



dalam menyampaikan ide-ide dan gagasan untuk mempertinggi kedudukan sosial.

Sebuah ungkapan cukup populer bahwa perempuan adalah tiang negara. jika mereka baik, maka kokohlah negara tersebut, namun jika mereka rusak maka hancurlah Negara itu. Ungkapan ini mengisyaratkan betapa pentingnya peran perempuan dalam sebuah negara. mereka memegang kunci atas nasib sebuah negara, namun demikian, apa yang terjadi dalam realitas justru sebaliknya, perempuan hadir di posisi penting pengambil kebijakan sebagai pejabat publik.

Penguatan posisi perempuan dalam masyarakat adalah sesuatu yang memberi peluang kepada perempuan untuk mengembangkan diri dalam ranah publik, hanya saja kondisi dan kesempatan perempuan sendiri belum memadai untuk mengisi peran-peran dalam mengambil kebijakan. Mayoritas ulama membolehkan perempuan menjadi *mufti*, yakni orang yang bertugas menjelaskan hukum-hukum Agama dengan argumentasi ilmiah dan tanggung jawab personal. Ibnu Jarir al-Thabari dan Hasan al-Bashri membolehkan perempuan menjadi hakim, dokter, dll, dan Dr. Ramadhan al-Buthi juga membolehkan perempuan menjadi anggota legislatif.

Eksistensi perempuan dalam menduduki jabatan-jabatan publik tentu dilihat dari jumlah mereka di dalamnya, tingkat partisipasi perempuan minat perempuan untuk mulai memberdayakan dirinya termasuk dalam ikut merumuskan kebijakan dan pengambilan keputusan yang nantinya akan

berdampak dan memberi kontribusi yang baik, sejalan dengan perkembangan zaman telah memungkinkan

perempuan memegang jabatan-jabatan penting, baik jabatan publik seperti, Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati, Camat, Lurah, hingga jabatan profesional seperti dokter, hakim, pengacara, guru besar, lainnya. Argumen superioritas laki-laki terhadap perempuan sejatinya telah dipatahkan oleh fakta di lapangan.

Potensi perempuan sebagai salah satu unsur dalam menunjang pembangunan nasional di Indonesia tidak disangsikan lagi karena separuh penduduknya adalah sebagian besar kaum perempuan, seperti di Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Kota Bandar Lampung terdapat pejabat perempuan yang menempati jabatan struktural adalah Ibu Yusfiati sebagai Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1 yang berbunyi “setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Dalam negara demokrasi, keterlibatan atau partisipasi perempuan pada posisi penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan akan berdampak pada keseimbangan masyarakat secara akurat dan akan terjadi pencapaian tujuan untuk menciptakan keadilan. Pembangunan nasional merupakan totalitas pembangunan daerah yang pada dasarnya ditujukan untuk melakukan perubahan, perbaikan, dan peningkatan kualitas hidup yang dilakukan secara

sadar, terencana, terarah, mencakup seluruh wilayah dalam rangka mencapai tujuannya.

Peranan perempuan dalam jabatan publik di Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Kota Bandar Lampung sudah terlihat jelas. Kaum perempuan sangat berperan aktif dalam kegiatan publik perempuan juga dinilai mampu menjalankan tugas, tanggung jawabnya dengan baik dan berwibawa yang tidak kalah performanya dengan kaum laki-laki. Oleh karena itu, tingkat pendidikan yang tinggi, menempati jabatan operasional dalam jenjang jabatan struktural dan memiliki kepangkatan yang tinggi, serta bekerja dan beraktifitas sebagai pejabat publik tentu secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi kemampuan pejabat perempuan dalam memahami dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan perannya sebagai pejabat publik.

## **B. Peran Perempuan dalam Jabatan Publik di Kantor Kelurahan Korpri Jaya Menurut Hukum Islam**

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandar Lampung dijelaskan bahwa:

Ayat (1) yaitu: Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan umum, ketentraman, dan ketertiban terhadap masyarakat di lingkungan Kelurahan.

Ayat (2) yaitu: Kelurahan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satu, mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan ;
- b. Pemberdayaan masyarakat ;
- c. Pelayanan masyarakat ;
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.

Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung yang bertanggung jawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri Kecamatan dan Kelurahan. Selanjutnya tugas dan fungsi pejabat perempuan di Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung yaitu :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan ;
- b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indonesia adalah sebuah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, yang memberi ruang cukup luas bagi perempuan untuk berkiprah di ruang publik. Sekaligus memberi harapan banyak bagi perempuan untuk mengambil peluang ini

Peran konsekuensi logis dari pengakuan perempuan sebagai warga negara sehingga mereka betul-betul bisa berperan sebagaimana harusnya, sesuai dengan keahliannya seperti menjadi guru, dosen, dokter, pengusaha, hakim, menteri, dan lainnya. Jika ia memiliki kompetensi serta sanggup menjalankan amanah, maka sah-sah saja, dengan syarat ketentuan dalam tugasnya tetap memperhatikan hukum-hukum atau aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.

Batasan-batasan yang perlu diperhatikan oleh perempuan yang berkiprah di ruang publik adalah: *pertama*, tugas dan kewajibannya dalam rumah tangga tidak terbengkalai; *kedua*, harus ada izin atau persetujuan dari suaminya bila ia seorang yang berkeluarga; dan *ketiga*, tidak mendatangkan hal-hal yang mudharat dan negatif terhadap diri dan Agamanya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٦﴾

Artinya : *Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana .(QS At-Taubah : 71).*<sup>1</sup>

Ayat di atas Allah SWT. Mempergunakan kata “*auliya*” (pemimpin), itu bukan hanya ditujukan kepada pihak laki-laki saja, akan tetapi keduanya (laki-laki dan perempuan) secara bersamaan. Berdasarkan ayat di atas, maka perempuan juga bisa menjadi pemimpin, yang terpenting dia mumpuni dalam bidangnya dan memenuhi kriteria yang ditetapkan dan harus adil bijak terhadap tugas dan tanggungjawabnya sebagai pemimpin.

Berbicara tentang kepemimpinan juga etika dalam Islam. Etika paling pokok dalam kepemimpinan adalah tanggungjawab, semua manusia yang hidup di muka bumi ini disebut sebagai pemimpin atas dirinya sendiri. Oleh karenanya sebagai pemimpin perempuan memikul tanggung jawab, sekurang-kurangnya terhadap dirinya sendiri. Seperti seorang suami bertanggung jawab atas isterinya, seorang bapak bertanggungjawab terhadap anak-anaknya, dan seorang atasan bertanggung jawab kepada bawahannya, begitu seterusnya.

Nilai dasar hukum Islam lainnya adalah amanah, dalam konsep amanah terdapat suatu asas akuntabilitas untuk melayani publik, kebijakan publik haruslah bersifat transparan dan diambil dengan mengacupada kepentingan masyarakat secara umum.

---

<sup>1</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponorogo, 2006), h. 628.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peranan perempuan dalam jabatan publik di Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan perempuan dalam jabatan publik di Kantor Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Bandar Lampung.

Perempuan dinilai mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, para perempuan sangat berperan aktif dalam kegiatan organisasi di masing-masing bidang yang ada. Perempuan yang bekerja di ruang publik dikarenakan kebutuhan finansial maka hal tersebut mengembalikan sifat domestik dari perempuan itu sendiri, oleh karena itu perempuan akan tetap dihargai sebagai pencari nafkah tambahan, sedangkan faktor yang mempengaruhi kedudukan perempuan dalam perannya sebagai pejabat publik meliputi: nilai-nilai sosial, pendidikan, pengalaman kerja, mentalitas perempuan, dan pemahaman perempuan terhadap peran yang diemban. Kemampuan perempuan sendiri yang menentukan secara langsung derajat kebebasannya dalam memilih sesuatu hal yang ingin dilakukan termasuk dalam bekerja, dan menduduki jabatan yang strategis, sehingga mereka dapat memainkan peran-peran yang mereka miliki terutama dalam memperjuangkan haknya.



2. Pandangan hukum Islam terhadap peran perempuan dalam jabatan publik di Kantor Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Kota Bandar Lampung.

Pada abad modern sekarang ini, hampir tidak ada lagi pekerjaan laki-laki yang tidak dapat dilakukan oleh perempuan, walaupun tidak semua perempuan itu dapat melakukannya, meskipun dahulu perempuan dianggap mustahil dapat mengerjakan pekerjaan di ruang publik dengan alasan lemah fisik dan mental, sesuai kodratnya, oleh sebab itu bukan lagi sesuatu yang mustahil bagi perempuan dalam banyak urusan karena perempuan mampu melakukan pekerjaan yang dikerjakan oleh laki-laki dan bisa menjadi patner kerjasama yang baik.

Islam adalah Agama yang komprehensif syarat yang tidak bisa dibagi-bagi. Artinya, ketika Islam telah menetapkan untuk perempuan dari hak-haknya diantaranya adalah ikut berpartisipasi dalam ruang publik. Islam menetapkan itu untuk menegakkan hukum berdasarkan kaidah-kaidah musyawarah, prinsip persamaan hak dan kewajiban, prinsip tanggung jawab, prinsip keadilan, dan prinsip mendasar bagi setiap warga negara yang dijadikan Islam sebagai dasar yang baku dalam menentukan hukum Allah SWT.

## **B. Saran**

Dalam rangka meningkatkan peranan perempuan pada posisi yang strategis di Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Kota Bandar Lampung, dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Perempuan yang bekerja sebagai pejabat publik untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural harus mengikuti kualifikasi yang ditentukan, maka bagi perempuan untuk dapat diangkat dan menduduki jabatan struktural harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
2. Pendidikan menjadi penunjang yang paling utama dalam diri seseorang, begitu juga dalam organisasi, untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural, pendidikan menjadi salah satu syarat. Begitu juga dalam organisasi untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural maka kaum perempuan harus mempunyai pendidikan untuk menduduki jabatan struktural tersebut.
3. Untuk menjalankan tugas dan menghasilkan kinerja yang baik maka perempuan juga diharapkan mempunyai pengalaman terhadap jabatan, hal ini dimiliki dari masa kerja yang relatif lama.
4. Sektor publik sebagai wadah dalam partisipasi perempuan, hendaknya lebih terbuka untuk para perempuan sehingga peran aktif mereka lebih dapat tersalurkan dan komunikasi terhadap perempuan akan berjalan dengan lancar serta diharapkan kepada perempuan untuk bisa membuktikan dirinya bahwa perempuan bisa menjadi mitra untuk bekerja sama dengan kaum laki-laki demi mencapai tujuan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Djalil, Dkk, *Fiqh Rakyat Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LKiS, 2000), Cet-1.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponogoro, 2006).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), Edisi Keempat.
- <http://evilaws.blogspot.com/2013/10/hak-hak-perempuan-di-bidang-politik-dan.html?m=1>.
- Husen Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2007).
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 200).
- Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan Relasi gender menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, (Jakarta: Teraju. 2004).
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994).
- Juwariyah Dahlan, *Peranan Wanita dalam Islam: Studi tentang Wanita Karier dan Pendidikan Anak*, (Yogyakarta: Disertasi IAIN Sunan Kalijaga, 2000).
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Alumni, 1986).
- Kartini Kartono, *Psikologi Wanita Jilid 2*, (Bandung: Mandar Maju, 2006).
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985).
- Lexi. J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2005).
- M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), Cetakan ke-13.
- Mansour Fakih, *Analisis Jender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).
- Moenawar Khalil, *Nilai wanita*, (Solo: Ramadhani, 1989).
- Nasruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), Cetakan ke-2, h.1.
- Ngainin Naim, *Sejarah pemikiran Hukum Islam*, (Bandung: Teras, 2009).
- Panji Anorogo & Ninik Widiyanti, *Psikologi dalam Perusahaan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kecamatan dan Kelurahan dalam Kota Bandar Lampung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 yang mengatur tentang Kelurahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan PP 100-2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan.

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan dan Penegasan batas wilayah Kecamatan dan Kelurahan.

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandar Lampung.

Siti Muri'ah, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karir*, (Semarang: Rasail Media Group, 2011), Cet-1.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986).

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000).

Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan*, (Jakarta: Amzah, 2009).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.